

LAPORAN HASIL AKTUALISASI

“PEMBUATAN KAMUS TEORI APBN PADA WEBSITE PUSAT KAJIAN ANGGARAN”

**PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
ANGKATAN I TAHUN 2018**



Disusun oleh :

**Nama : Sekar Aditya Dwikirana, S.E.
NIP : 199405012018012002
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Instansi : Pusat Kajian Anggaran**

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT DIKLAT SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI ANGKATAN I TAHUN 2018

Nama : Sekar Aditya Dwikirana, S.E.
NIP : 199405012018012002
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Instansi : Pusat Kajian Anggaran

Bogor, 2 Oktober 2018

Mengetahui,
Coach

Menyetujui,
Mentor

Bambang Wiyoso, ST, MMSI
NIP. 197204112005011001

Robby Alexander Sirait, S.E, M.E
NIP. 198203042014021003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang mana atas bimbingannya maka penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS dan Pengetahuan Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI sebagai salah satu prasyarat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Laporan Aktualisasi ini dapat diselesaikan karena tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Drs. Helmizar, selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
2. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran.
3. Mardi Harjo, S.E., M.Si., selaku Kepala Bagian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
4. Bambang Wiyoso, S.T., M.Si., selaku *coach* PNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI.
5. Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., selaku mentor kegiatan Aktualisasi Diklatsar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI,
6. Vita Puji, Achmad Yugo, Eko Adityo, Fajri Ramadhan, Faqih Nur, Slamet Dhul, dan Sylvia Febrina, selaku rekan-rekan satu unit, serta
7. Seluruh CPNS dan PNS Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Angkatan Tahun 2018

Laporan ini menyajikan dokumentasi atas proses pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis sebagai Calon Analis APBN Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta pengetahuan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Maka laporan ini diharapkan besar kecilnya dapat memberikan kontribusi baik dari segi pemikiran/gagasan, maupun memperkaya referensi dan literature bagi pihak-pihak terkait.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 2 Oktober 2018

Sekar Aditya Dwikirana, S.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kajian Anggaran	1
B Visi Misi Pusat Kajian Anggaran	1
C Tugas Pokok dan Fungsi Analis APBN Ahli Pertama	2
II RANCANGAN AKTUALISASI	3
A Deskripsi Isu	3
B Pemilihan Isu Prioritas	5
C Pemilihan Gagasan Prioritas	5
D Matriks Rancangan Aktualisasi	6
E Potensi Kendala Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi	13
F Rancangan Jadwal Kegiatan Aktualisasi	13
III PELAKSANAAN AKTUALISASI	14
A Matriks Pelaksanaan Aktualisasi	14
B Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi	26
IV PENUTUP	28
A Kesimpulan	28
B Saran	29
C Tindak Lanjut.....	29
LAMPIRAN	31

BAGIAN I.

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Pusat Kajian Anggaran secara resmi terbentuk setelah disahkannya Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sesuai dengan Peraturan Sekjen tersebut tugas pokok dan fungsi Pusat Kajian Anggaran diuraikan sebagai berikut:

➤ **Tugas Pokok :**

Mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN

➤ **Fungsi :**

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
3. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
6. Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;
7. Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
8. Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan
9. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

B. VISI DAN MISI PUSAT KAJIAN ANGGARAN

➤ **Visi**

Rumusan visi Pusat Kajian Anggaran mengacu pada Visi Badan Keahlian DPR RI, dengan fokus pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai unsur pendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Dengan demikin, visi Pusat Kajian Anggaran adalah :

Pusat Kajian Anggaran yang profesional mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

➤ Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran menyusun misi sebagai berikut:

- a) Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- b) Memperkuat manajemen pengetahuan.
- c) Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ANALIS APBN AHLI PERTAMA

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analis APBN, tugas dan fungsi Jabatan Analis APBN Ahli Pertama adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD.
- b. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri, secara individual, sebagai anggota atau ketua tim.
- c. Menyusun Analisis Ringkas Cepat (ARC), secara individual, sebagai anggota atau ketua tim.
- d. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan DPD, serta ARC.

BAGIAN II. RANCANGAN AKTUALISASI

A. DESKRIPSI ISU

1. KURANGNYA INFORMASI MENGENAI PUSTAKA TEORI BERKAITAN DENGAN APBN

Berdasarkan pemantauan pada *website* Pusat Kajian Anggaran, dalam menu *knowledge management* kolom kamus hanya memuat informasi mengenai daftar istilah APBN yang sering dipakai dan belum adanya daftar mengenai teori-teori berkaitan dengan APBN.

Bila isu tersebut tidak dapat tertangani maka akan menimbulkan dampak:

- kurangnya pengetahuan mengenai teori-teori berkaitan dengan APBN yang dapat mendukung pembuatan jurnal, kajian, maupun telaahan sehingga dapat menghambat analis APBN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
- lambatnya kinerja analis dalam membuat jurnal, kajian, dan telaahan karena diperlukan waktu untuk mencari buku-buku teori berkaitan dengan APBN.

Dukungan teoritik yang digunakan dalam isu ini adalah Manajemen ASN.

2. BELUM ADANYA KAJIAN MENGENAI TEMUAN BERULANG HASIL PEMERIKSAAN BPK PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Berdasarkan pemantauan pada *website* Pusat Kajian Anggaran dalam menu produk kajian pada siklus pengawasan masih berupa kajian mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2015 dan Tinjauan Singkat atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015.

Bila isu tersebut tidak dapat tertangani maka akan menimbulkan dampak:

- Kurangnya *review* pengetahuan mengenai temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan BPK pada kementerian/lembaga.

Dukungan teoritik yang digunakan dalam isu ini adalah Manajemen ASN.

3. BELUM OPTIMALNYA KOMPETENSI ANALIS APBN DALAM MENYAJIKAN INFORMASI APBN SECARA MENARIK MELALUI APLIKASI BERBASIS INTERNET

Berdasarkan pemantauan pada *website* Pusat Kajian Anggaran, dalam menu produk kolom infografis, infografis yang disajikan masih menggunakan aplikasi *ms.word* dan belum menggunakan aplikasi berbasis internet.

Bila isu tersebut tidak dapat tertangani maka akan menimbulkan dampak:

- Hasil tampilan output infografis yang dihasilkan kurang optimal;
- Lambatnya kinerja analis dalam menyelesaikan infografis bila masih menggunakan aplikasi *ms.word*.

Dukungan teoritik yang digunakan dalam isu ini adalah Manajemen ASN.

B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS

Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Kurangnya Informasi Mengenai Pustaka Teori Berkaitan Dengan APBN	5	5	5	15
2	Belum Adanya Kajian Mengenai Temuan Berulang Hasil Pemeriksaan BPK pada Kementerian/Lembaga	4	2	2	8
3	Belum Optimalnya Kompetensi Analis APBN dalam Penyajian Informasi APBN secara menarik melalui Aplikasi Berbasis Internet	3	3	2	8

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah :

- 1) Isu ke-1 dengan rumusan isu : **Kurangnya Informasi Mengenai Pustaka Teori Berkaitan Dengan APBN.**

C. PEMILIHAN GAGASAN PRIORITAS

Matrik Pemilihan Gagasan Prioritas dengan Analisis USG

No	Gagasan	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Membuat Forum Diskusi Mingguan untuk Membahas Teori-Teori Berkaitan Dengan APBN	2	2	2	6
2	Membuat Kamus Teori-Teori Berkaitan Dengan APBN	5	5	5	15
3	Membuat Infografis Teori-Teori Berkaitan Dengan APBN	4	3	3	10

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka gagasan yang dipilih adalah

:

- 1) Gagasan ke-1 dengan rumusan gagasan : **Membuat Kamus Teori-Teori Berkaitan dengan APBN**

D. MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja	: Pusat Kajian Anggaran
Identifikasi Isu	<ul style="list-style-type: none"> : 1. Kurangnya informasi mengenai pustaka teori berkaitan dengan APBN 2. Belum adanya kajian mengenai temuan berulang hasil pemeriksaan BPK pada Kementerian/Lembaga 3. Belum Optimalnya Kompetensi Analis APBN dalam Penyajian Informasi APBN secara menarik melalui Aplikasi Berbasis Internet
Isu yang Diangkat	: Kurangnya informasi mengenai pustaka teori berkaitan dengan APBN
Gagasan Pemecahan Isu	: Membuat kamus teori-teori berkaitan dengan APBN

Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Konsultasi dengan Atasan	1. Menetapkan tanggal konsultasi 2. Menghubungi sekretaris atasan 3. Pelaksanaan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Surat persetujuan melakukan kegiatan. 	Mengawali kegiatan ini, saya akan menentukan agenda untuk melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pusat Kajian Anggaran DPR RI. Setelah menentukan agenda, saya akan melakukan koordinasi dengan Kepala Subbagian TU Pusat Kajian Anggaran DPR RI mengenai penentuan jadwal konsultasi (WOG). Setelah ditentukan jadwal	Dengan melakukan konsultasi bersama atasan maka fungsi organisasi yaitu koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran dapat tercapai.	Dengan konsultasi bersama atasan maka nilai organisasi yaitu nilai Akuntabilitas dan Profesionalitas dapat diperkuat.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<p>konsultasi tersebut, maka saya akan melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pusat Kajian Anggaran DPR RI dengan memperhatikan etika dan sopan santun (Etika Publik). Setelah melakukan konsultasi, saya akan meminta surat persetujuan melakukan kegiatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Pusat Kajian Anggaran DPR RI. (Akuntabilitas)</p>		
	Melakukan inventarisir pustaka buku-buku/ jurnal teori APBN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor 2. Mengidentifikasi buku/jurnal teori-teori berkaitan dengan APBN 3. Melakukan pencarian buku ke Perpustakaan DPR RI, Perpustakaan MPR RI, dan website yang menyediakan jurnal online. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen daftar pustaka buku dan jurnal yang diperlukan. 	<p>Mengawali kegiatan ini, saya akan berkoordinasi dengan mentor untuk mendiskusikan mengenai buku-buku yang berkaitan dengan teori-teori mengenai APBN dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun (Etika Publik dan WOG). Setelah berkonsultasi, maka saya akan menginventarisir buku-</p>	<p>Dengan melakukan inventarisir pustaka buku dan jurnal maka misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.</p>	<p>Dengan melakukan inventarisir pustaka buku dan jurnal maka nilai organisasi Profesionalitas dapat diperkuat.</p>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4. Melakukan peminjaman buku serta mengunduh jurnal online.		buku/jurnal yang akan digunakan untuk penyusunan kamus dan membuat dokumen daftar pustaka buku dan jurnal tersebut (Akuntabilitas) , kemudian saya akan melakukan pencarian dan peminjaman buku atau mengunduh jurnal dengan tetap memperhatikan etika dalam menggunakan barang milik negara seperti penggunaan komputer, jaringan wifi, dan fasilitas perpustakaan (Etika Publik)		
	Telaahan teori-teori pendukung terkait APBN	1. Konsultasi dengan mentor 2. Membaca dan menelaah teori-teori berkaitan dengan APBN 3. Membuat ringkasan teori-teori berkaitan dengan APBN	• Dokumen ringkasan dan telaahan teori-teori berkaitan dengan APBN	Mengawali kegiatan ini, saya akan berkoordinasi dengan mentor untuk melaporkan buku-buku atau jurnal yang telah didapat dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun (Etika Publik dan WOG) . Setelah berkonsultasi,	Dengan melakukan telaahan teori-teori berkaitan dengan APBN maka visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang profesional serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen	Dengan melakukan telaahan teori-teori berkaitan dengan APBN maka nilai organisasi Akuntabilitas dan Profesionalitas dapat diperkuat.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				maka saya akan membaca dan membuat draft ringkasan dan telaahan teori-teori tersebut (Akuntabilitas)	pengetahuan dapat tercapai.	
	Penyusunan kamus	1. Mencari referensi format yang menarik melalui internet 2. Membuat format kamus 3. Konsultasi dengan mentor terkait format kamus 4. Memasukkan data telaahan teori ke dalam format kamus 5. Konsultasi dengan mentor terkait hasil telaahan teori 6. Menginventarisir koreksi kesalahan-kesalahan dalam penulisan. 7. Melakukan perbaikan kamus jika ada yang koreksi dari mentor/atasan 8. Meminta persetujuan mentor untuk finalisasi kamus	<ul style="list-style-type: none"> Kamus teori-teori berkaitan dengan APBN. 	Mengawali kegiatan ini, saya akan mencari referensi format yang menarik melalui internet (Komitmen Mutu) dan membuat format ringkasan dengan tetap memperhatikan etika dalam menggunakan jaringan internet (Etika Publik). Setelah itu, saya akan memasukkan data ringkasan ke dalam format yang telah disusun dan membuat draft dokumen kamus teori pendukung APBN (Akuntabilitas). Kemudian saya akan berkoordinasi dengan mentor untuk melaporkan draft kamus teori-teori berkaitan dengan APBN dengan tetap memperhatikan	Dengan melakukan penyusunan kamus maka tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN ; fungsi organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran, koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi ; visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang professional dan akuntabel ; serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.	Dengan penyusunan kamus maka nilai organisasi Akuntabilitas, Profesionalitas, dan Integritas dapat diperkuat.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<p>etika dan sopan santun (Etika Publik, WOG, dan Akuntabilitas). Setelah itu, saya akan menginventarisir koreksi kesalahan dalam penulisan yang diberikan mentor (Komitmen Mutu dan Akuntabilitas). Setelah menginventarisir kesalahan maka saya akan melakukan perbaikan kamus yang kemudian dilaporkan kembali kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan finalisasi dokumen dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun (Akuntabilitas, Etika Publik dan Komitmen Mutu).</p>		
	Publikasi kamus pada website Pusat Kajian Anggaran	1. Melakukan konsultasi dengan mentor 2. Melakukan koordinasi dengan pengelola website	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen telah terpublikasi pada website 	Mengawali kegiatan ini, saya akan berkoordinasi dengan mentor untuk melaporkan dokumen final kamus teori-teori berkaitan dengan APBN	Dengan melakukan publikasi kamus pada website Pusat Kajian Anggaran maka tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran	Dengan publikasi kamus maka nilai organisasi Akuntabilitas; Profesionalitas; dan

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3. Mengirimkan dokumen kamus 4. Melakukan pengecekan website	<ul style="list-style-type: none"> Berita acara upload kamus ke website 	<p>dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun (Etika Publik, WOG, dan Akuntabilitas). Setelah itu saya juga akan melakukan koordinasi dengan pengelola website untuk membantu mempublikasikan kamus teori tersebut dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun (Etika Publik dan WOG). Tahap terakhir saya akan melakukan pengecekan pada website untuk memastikan kamus telah terpublikasi (Akuntabilitas, Komitmen Mutu)</p>	<p>pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN; fungsi organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran; visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel; serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.</p>	Integritas dapat diperkuat.
	Pembuatan laporan kegiatan	1. Konsultasi dengan mentor 2. Pengumpulan data terkait pembuatan laporan kegiatan 3. Penyusunan laporan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pembuatan kamus 	<p>Mengawali kegiatan ini, saya akan berkoordinasi dengan mentor untuk pembuatan laporan kegiatan dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun (Etika Publik, WOG, dan Akuntabilitas). Setelah</p>	<p>Dengan pembuatan laporan kegiatan maka visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel dapat tercapai.</p>	<p>Dengan pembuatan laporan kegiatan maka nilai organisasi Akuntabilitas; Profesionalitas; dan Integritas dapat diperkuat.</p>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				itu saya akan melakukan pengumpulan data untuk mendukung pembuatan laporan kegiatan (Komitmen Mutu dan Akuntabilitas). Tahap terakhir saya akan membuat laporan kegiatan secara tranparan (Akuntabilitas).		

E. POTENSI HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan "Pembuatan Kamus Teori APBN pada Website Pusat Kajian Anggaran", terdapat potensi hambatan sebagai berikut :

1. Sinkronisasi jadwal konsultasi dengan atasan maupun mentor.
2. Ketersediaan buku ataupun jurnal yang memuat teori-teori berkaitan dengan APBN yang terbatas.
3. Pengaturan waktu antara time schedule kegiatan aktualisasi dengan realisasi kegiatan aktualisasi.

F. RANCANGAN JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI		JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Konsultasi dengan Atasan dan Mentor																		
2.	Melakukan inventarisir pustaka buku-buku/ jurnal teori berkaitan dengan APBN																		
3.	Telaahan teori-teori berkaitan dengan APBN																		
4.	Penyusunan kamus																		
5.	Publikasi kamus pada website Pusat Kajian Anggaran																		
6.	Pembuatan Laporan Kegiatan																		

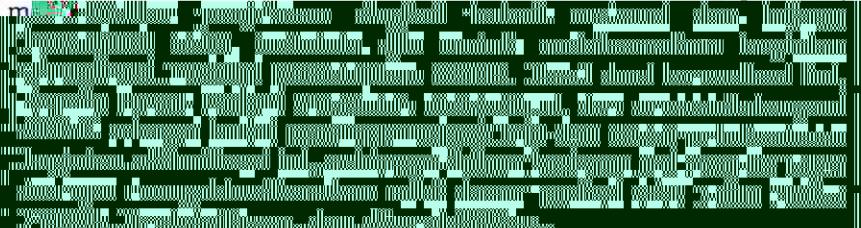
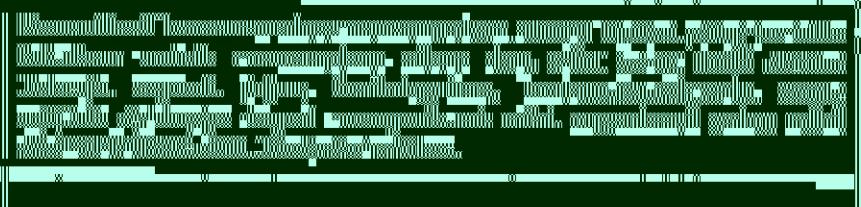
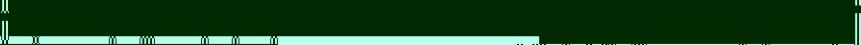
BAGIAN III
PELAKSANAAN AKTUALISASI

Isu yang Diangkat	: Kurangnya informasi mengenai pustaka teori berkaitan dengan APBN
Gagasan Pemecahan Isu	: Membuat Kamus Teori-Teori Berkaitan Dengan APBN
Judul	: Pembuatan Kamus Teori Apbn Pada Website Pusat Kajian Anggaran

A. MATRIK PELAKSANAAN AKTUALISASI

Kegiatan 1	Konsultasi dengan Atasan
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tanggal konsultasi 2. Menghubungi sekretaris atasan 3. Pelaksanaan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir) 2. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan (terlampir)
Tanggal Pelaksanaan	28 Mei 2018 – 30 Mei 2018
Hambatan	Pada pelaksanaan kegiatan pertama ini, penulis mengalami hambatan untuk dapat mencetak surat keterangan melaksanakan kegiatan dikarenakan printer belum tersedia.
Solusi	Untuk mengatasi hambatan tersebut penulis mencetak surat kegiatan tersebut di tempat rental fotokopi.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Pelaksanaan kegiatan konsultasi dengan atasan merupakan kegiatan permohonan ijin kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran untuk dapat melakukan kegiatan aktualisasi. Hal pertama yang penulis lakukan adalah menetapkan usulan tanggal konsultasi. Pada tanggal 28 Mei 2018, penulis berkoordinasi dengan mentor terkait rencana permohonan konsultasi tersebut secara sopan menggunakan Bahasa Indonesia secara baik dan benar serta menentukan tanggal dengan memperhatikan situasi dan kondisi apakah Kepala Pusat Kajian Anggaran sedang dalam kegiatan maupun kunjungan kerja. Sehingga dalam tahapan kegiatan pertama ini penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu Etika Publik dan Nasionalisme.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Setelah menetapkan tanggal usulan konsultasi, tahapan selanjutnya penulis menghubungi sekretaris atasan/staf penyusun bahan kebijakan untuk mendapatkan konfirmasi tanggal konsultasi dengan bersikap ramah dan sopan saat melakukan koordinasi. Selain itu, penulis juga meminta contoh Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan (SKMK) untuk kemudian dijadikan acuan dalam membuat SKMK kegiatan aktualisasi. Setelah SKMK dibuat, penulis kemudian menyerahkan <i>draft</i> SKMK tersebut kepada mentor dengan sopan untuk mendapatkan koreksi serta paraf. Dalam tahapan kegiatan ini penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu Etika Publik, Whole of Government (WOG) dan Komitmen Mutu.</p>

Tahapan kegiatan 3 – Setelah SKMK disampaikan kepada mentor dan disetujui, tahapan selanjutnya adalah **melaksanakan kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran**. Sebelum pelaksanaan konsultasi, Staf Penyusun Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran terlebih dahulu memberikan konfirmasi mengenai jadwal konsultasi yang dapat dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018. Dalam pelaksanaan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dengan tetap bersikap hormat dan sopan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, penulis m.

	
x m M M	
Mengirim e-mail Mengirim pesan	
	

Kegiatan 2	Melakukan Inventarisir Pustaka Buku-Buku/Jurnal Teori APBN
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor. 2. Mengidentifikasi buku/jurnal teori-teori berkaitan dengan APBN 3. Melakukan pencarian buku ke Perpustakaan DPR RI, Perpustakaan MPR RI, dan website yang menyediakan jurnal online. 4. Melakukan peminjaman buku serta mengunduh jurnal online
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir) 2. Dokumen daftar pustaka buku/jurnal yang diperlukan (terlampir)
Tanggal Pelaksanaan	4 Juni 2018 – 3 Juli 2018
Hambatan	Pada tahapan ketiga, penulis sempat mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian buku/jurnal teori-teori yang telah diidentifikasi disebabkan karena tahun terbit buku yang sudah cukup lama dan beberapa stok buku yang telah diidentifikasi tidak tersedia di Perpustakaan.
Solusi	Untuk mengatasi hambatan dalam mencari buku/jurnal tersebut, penulis berinisiatif mencari alternatif buku lain yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan APBN.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Pada tanggal 4 Juni 2018, penulis melaksanakan konsultasi dengan mentor untuk mendiskusikan mengenai buku/jurnal serta teori APBN yang akan dijadikan bahan untuk pembuatan kamus dengan tetap bersikap ramah dan sopan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga dalam tahapan kegiatan ini penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu Etika Publik, Nasionalisme, dan WOG.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Setelah berkonsultasi dengan mentor, penulis kemudian mengidentifikasi buku/jurnal teori-teori berkaitan dengan APBN. Dalam tahapan kegiatan ini, penulis membuat dokumen daftar pustaka teori, buku serta jurnal yang akan dijadikan bahan pembuatan kamus sebagai bukti pertanggungjawaban, sehingga penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu Akuntabilitas dan Komitmen Mutu.</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Tahap selanjutnya setelah mengidentifikasi buku/jurnal yang akan dijadikan bahan kamus, penulis kemudian melakukan pencarian buku ataupun jurnal online. Pencarian buku dilakukan di Perpustakaan DPR sedangkan pencarian jurnal online dilakukan dengan mesin pencari (<i>googling</i>). Meskipun pencarian buku dilakukan pada jam istirahat, penulis tetap meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan, sehingga penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yakni Etika Publik dan Komitmen Mutu.</p>

	Tahapan kegiatan 4 – Setelah melakukan pencarian buku dan jurnal online, penulis kemudian melakukan peminjaman buku di Perpustakaan DPR serta melakukan unduh jurnal online untuk kemudian dijadikan bahan pembuatan kamus. Khususnya dalam meminjam buku milik Perpustakaan DPR, penulis tetap berhati-hati dalam menggunakan fasilitas perpustakaan yang ada sebagai bentuk bahwa penulis telah mengaktualisasikan nilai Etika Publik .
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Melakukan inventarisir pustaka buku merupakan upaya penulis untuk mengetahui buku maupun jurnal apa saja yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan APBN. Dengan demikian, misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.
Penguatan Organisasi	Menginventarisir pustaka buku dan jurnal merupakan suatu upaya yang penulis lakukan untuk dapat mengembangkan pengetahuan penulis terkait teori-teori terkait dengan APBN yang dapat dijadikan referensi bagi penulis untuk melaksanakan tugas sebagai Analis APBN di masa mendatang. Dengan demikian nilai organisasi yaitu Profesionalitas dapat diperkuat.
Catatan Mentor	

Kegiatan 3	Telaahaan Teori-Teori Pendukung terkait APBN
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor 2. Membaca dan menelaah teori-teori berkaitan dengan APBN 3. Membuat ringkasan teori-teori berkaitan dengan APBN
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir) 2. Dokumen ringkasan dan telaahan teori-teori berkaitan dengan APBN (terlampir)
Tanggal Pelaksanaan	9 Juli 2018 – 7 Agustus 2018
Hambatan	Dalam menelaah teori-teori pendukung yang terkait dengan APBN, penulis mengalami dua hambatan yaitu: pertama , penulis kesulitan mengerjakan telaahan tersebut pada waktu jam kerja disebabkan padatnya tugas pokok jabatan; kedua , penulis memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat memahami isi teori dalam satu buku.
Solusi	Untuk mengatasi hambatan yang pertama, proses penelaahan teori dilakukan diluar jam kerja maupun ketika akhir pekan. Sedangkan untuk hambatan yang kedua, penulis mencoba memahami satu teori dengan membaca beberapa referensi sehingga dapat menghasilkan telaahan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Pada tanggal 9 Juli 2018, penulis melaksanakan konsultasi dengan mentor untuk melaporkan hasil inventarisir terkait buku/jurnal yang telah didapat serta mengajukan contoh teori yang akan ditelaah dengan tetap bersikap ramah dan sopan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu Etika Publik, Nasionalisme, dan WOG.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Tahapan selanjutnya, penulis membaca dan menelaah teori-teori berkaitan dengan APBN. Dalam tahapan kegiatan ini, penulis menelaah satu teori dengan membaca beberapa referensi buku dengan cermat dan teliti untuk dapat menyajikan telaahan teori yang mudah dimengerti sebagai wujud penulis mampu mengaktualisasikan dasar profesi ASN Komitmen Mutu.</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Kemudian tahap terakhir, penulis membuat ringkasan teori-teori berkaitan dengan APBN dengan membuat draft ringkasan dan telaahan teori-teori tersebut sebagai bukti bahwa penulis telah melakukan penelaahan teori tersebut. Dengan demikian, penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu Komitmen Mutu dan Akuntabilitas.</p>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Melakukan telaahan teori-teori berkaitan dengan APBN merupakan upaya penulis untuk dapat mengetahui dan memahami teori-teori yang berkaitan dengan APBN. Sehingga dari kegiatan penelaahan teori-teori pendukung terkait APBN, visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang Profesional serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.
Penguatan Nilai Organisasi	Menelaah teori-teori berkaitan dengan APBN merupakan suatu upaya yang penulis lakukan untuk bertanggungjawab menyajikan ringkasan teori yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi para

	pembaca sehingga dapat memperkuat nilai organisasi yaitu nilai Akuntabilitas dan Profesionalitas .
Catatan Mentor	

Kegiatan 4	Penyusunan Kamus
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari referensi format yang menarik melalui internet 2. Membuat format kamus 3. Konsultasi dengan mentor terkait format kamus 4. Memasukkan data telaahan teori ke dalam format kamus 5. Konsultasi dengan mentor terkait hasil telaahan teori 6. Menginventarisir koreksi kesalahan-kesalahan dalam penulisan 7. Melakukan perbaikan kamus jika ada yang dikoreksi dari mentor/atasan 8. Meminta persetujuan mentor untuk finalisasi kamus
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir) 2. Kamus teori-teori berkaitan dengan APBN (terlampir)
Tanggal Pelaksanaan	31 Juli 2018 – 31 Agustus 2018
Hambatan	Dalam kegiatan penyusunan kamus ini hambatan yang dialami penulis masih terkait dengan waktu penggerjaan yang tidak dapat dilakukan pada waktu jam kerja disebabkan padatnya tugas pokok jabatan.
Solusi	Untuk mengatasi hambatan tersebut, proses penyusunan kamus dilakukan diluar jam kerja maupun ketika akhir pekan.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Pada tanggal 31 Agustus 2018, penulis mulai memasuki kegiatan penyusunan kamus. Hal pertama yang dilakukan penulis adalah mencari referensi format yang menarik melalui internet. Dalam proses mencari referensi ini, penulis berusaha mencari referensi format yang dapat menggabungkan unsur biografi sang penemu teori dengan telaahan teori yang telah dibuat agar dapat dijadikan dalam satu format ringkas. Proses mencari referensi format ini tetap memperhatikan etika dalam menggunakan wifi yang merupakan fasilitas kantor, sehingga penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu Komitmen Mutu dan Etika Publik.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Setelah mendapatkan ide dari referensi format kamus, penulis kemudian membuat format kamus secara ringkas namun tetap kreatif dan inovatif sehingga teori-teori yang telah ditelaah dapat menarik minat pembaca sebagai wujud penulis telah mampu mengaktualisasikan dasar profesi ASN Komitmen Mutu.</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Tahap selanjutnya, setelah format kamus dibuat, penulis melakukan konsultasi dengan mentor dengan menyerahkan contoh format kamus yang telah dicetak untuk kemudian meminta saran/masukan terkait format kamus tersebut dengan tetap bersikap sopan menggunakan Bahasa Indoensia yang baik dan benar sehingga penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu Etika Publik, Whole of Government (WOG), Akuntabilitas, dan Nasionalisme.</p>

	<p>Tahapan kegiatan 4 – Setelah melakukan konsultasi, mentor kemudian menyetujui format tersebut dan meminta penulis untuk melanjutkan pada proses selanjutnya yaitu memasukkan seluruh data telaahan teori ke dalam format kamus. Dalam tahapan ini, penulis merapikan kembali susunan dan memeriksa kesalahan ketik (<i>typo</i>) telaahan teori dengan cermat dan teliti agar lebih rapi ketika dibaca. Dengan demikian penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu Komitmen Mutu.</p> <p>Tahapan kegiatan 5 – Tahap selanjutnya penulis kembali melakukan konsultasi dengan mentor terkait hasil telaahan yang telah tersaji dalam bentuk format kamus yang telah dicetak untuk kemudian diberikan masukan/saran dengan tetap bersikap sopan menggunakan Bahasa Indoensia yang baik dan benar sehingga penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu Etika Publik dan Nasionalisme.</p> <p>Tahapan kegiatan 6 – Berdasarkan hasil konsultasi, mentor mengatakan bahwa susunan kamus teori yang telah dibuat sudah cukup baik namun terdapat sedikit koreksi terkait tambahan untuk pemaparan teori Adam Smith. Saran koreksi tersebut kemudian diinventarisir oleh penulis dengan cermat agar dapat dilakukan perbaikan segera sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu Komitmen Mutu.</p> <p>Tahapan kegiatan 7 – Setelah menginventarisir koreksi kesalahan penulisan kamus, penulis kemudian melakukan perbaikan kamus dengan menambahkan pemaparan Teori Adam Smith melalui berbagai referensi dengan cermat sebagai wujud penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu Komitmen Mutu.</p> <p>Tahapan kegiatan 8 - Tahap terakhir, setelah melakukan perbaikan yang diminta mentor, penulis melaporkan kembali kepada mentor dengan membawa hasil cetak kamus yang telah diperbaiki sekaligus meminta pesetujuan finalisasi dokumen kamus dengan tetap bersikap sopan. Dalam tahapan kegiatan ini penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas dan Etika Publik.</p>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Dengan melakukan penyusunan kamus, penulis telah berupaya untuk menyajikan kumpulan teori APBN yang dapat memudahkan Analis APBN ketika ingin mereviu kembali pengetahuan tentang ilmu-ilmu ekonomi dan membutuhkan bahan referensi ketika akan menulis kajian maupun jurnal. Sehingga dari kegiatan tersebut, tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN ; fungsi organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran, koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi ; visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang professional dan akuntabel ; serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.
Penguatan Nilai Organisasi	Penyusunan kamus merupakan suatu upaya yang penulis lakukan untuk bertanggungjawab menyajikan ringkasan teori yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi para pembaca sehingga dapat memperkuat nilai organisasi yaitu nilai Akuntabilitas , Profesionalitas , dan Integritas .
Catatan Mentor	

Kegiatan 5	Publikasi Kamus pada Website Pusat Kajian Anggaran
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan konsultasi dengan mentor 2. Melakukan koordinasi dengan pengelola website 3. Mengirimkan dokumen kamus 4. Melakukan pengecekan website 5. Sosialisasi kepada staff dan analis APBN
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan Rapat Koordinasi dengan BDTI (terlampir) 2. Surat Tugas Mengikuti Rapat Koordinasi dengan BDTI (terlampir) 3. Daftar hadir peserta rapat (terlampir) 4. Laporan Singkat (terlampir) 5. Nota Dinas (terlampir) 6. <i>Screenshot</i> dokumen kamus yang telah terpublikasi pada website (terlampir) 7. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Publikasi Kamus (terlampir) 8. Berita acara upload kamus ke website (terlampir) 9. Lembar testimoni yang telah diisi oleh beberapa analis Pusat Kajian Anggaran (terlampir)
Tanggal Pelaksanaan	28 Mei 2018, 7 Juni 2018 – 8 Juni 2018, 7 September 2018, dan 24 September 2018
Hambatan	Dalam kegiatan ini penulis mengalami hambatan dalam melakukan <i>upload</i> kamus sebab terdapat kendala akses pada website Pusat Kajian Anggaran.
Solusi	Untuk mengatasi hambatan tersebut, penulis dengan sopan meminta tolong dan meminta ijin pada mentor untuk dapat meng <i>upload</i> dokumen kamus tersebut melalui akun portal mentor.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Tahapan melakukan konsultasi dengan mentor untuk meminta pertimbangan ijin akses upload dokumen kamus yang semula direncanakan akan dilakukan pada minggu kedua bulan September namun ternyata direalisasikan lebih awal pada tanggal 28 Mei 2018. Hal ini dikarenakan beberapa CPNS Analis APBN juga memiliki kegiatan yang sama yaitu mengajukan ijin akses upload kepada pengelola website (BDTI). Dalam berkonsultasi dengan mentor dengan tetap bersikap sopan, penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN yaitu Etika Publik dan Whole of Government (WOG).</p>

	<p>Tahapan kegiatan 2 – Tahap selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan pengelola website. Tahap ini semula juga direncanakan dilakukan pada minggu kedua bulan September namun ternyata direalisasikan lebih awal pada tanggal 7 Juni 2018 – 8 Juni 2018. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan CPNS Analis APBN lain yang memiliki kegiatan serupa untuk efektivitas dan efisiensi waktu dikarenakan koordinasi dengan BDTI yang membutuhkan kesesuaian waktu antara kedua belah pihak baik dari Pusat Kajian Anggaran maupun dari BDTI. Koordinasi dengan BDTI kemudian dilakukan melalui Rapat Dalam Kantor (RDK), hasil dari rapat koordinasi tersebut antara lain adalah BDTI telah membuka ijin akses pada website Pusat Kajian Anggaran berdasarkan permintaan pada Nota Dinas yang telah dibuat tertanggal 7 Juni 2018 dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pengunggahan dokumen dan berbagai hal teknis lain. Dalam melakukan koordinasi dengan BDTI penulis tetap bersikap sopan sebagai wujud penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN yaitu Etika Publik dan Whole of Government (WOG).</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Setelah mendapatkan ijin akses upload pada website Pusat Kajian Anggaran, tahap selanjutnya penulis melakukan pengunggahan dokumen kamus pada website Pusat Kajian Anggaran. Dalam melakukan upload dokumen kamus, penulis terlebih dahulu meminta ijin dengan ramah dan sopan kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran dan juga mentor sebagai wujud penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas dan Etika Publik.</p> <p>Tahapan kegiatan 4 - Setelah melakukan unggah dokumen kamus, penulis kemudian melakukan pengecekan website untuk memastikan dokumen kamus pada <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran telah dapat diakses dan diunduh. Selain itu, sebagai bukti bahwa dokumen kamus telah diunggah, penulis membuat SKMK terkait publikasi kamus serta Berita Acara <i>upload</i> kamus yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran beserta mentor sebagai wujud penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN yaitu Komitmen Mutu dan Akuntabilitas.</p> <p>Tahapan kegiatan 5 – Tahap terakhir penulis melakukan sosialisasi kepada staf dan analis APBN. Sebelum tahap sosialisasi dilakukan, penulis terlebih dahulu berkoordinasi dengan mentor secara sopan terkait tanggal dan waktu pelaksanaan sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada hari Senin, 24 September 2018 pukul 09.00, bertempat di ruang rapat Pusat Kajian Anggaran, penulis menyampaikan produk kamus yang telah dibuat dan diunggah pada website Pusat Kajian Anggaran menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam tahapan kegiatan ini, penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN yaitu Etika Publik dan Akuntabilitas, dan Nasionalisme.</p>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Dengan melakukan publikasi kamus, penulis telah berupaya untuk menyajikan kumpulan teori APBN yang dapat memudahkan Analis APBN ketika ingin mereviu kembali pengetahuan tentang ilmu-ilmu ekonomi dan membutuhkan bahan referensi ketika akan menulis kajian maupun jurnal. Sehingga dari kegiatan tersebut, tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN ; fungsi organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran ; visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang

	professional, andal, dan akuntabel ; serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.
Penguatan Nilai Organisasi	Publikasi kamus merupakan suatu upaya yang penulis lakukan untuk bertanggungjawab menyajikan ringkasan teori yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi para pembaca serta menyediakan kemudahan akses bagi siapa saja yang membutuhkan teori tersebut sebagai bahan referensi, reviu ataupun menambah pengetahuan tentang ilmu-ilmu ekonomi. Sehingga dari kegiatan tersebut nilai organisasi yaitu nilai Akuntabilitas; Profesionalitas; dan Integritas dapat diperkuat.
Catatan Mentor	

Kegiatan 6		Pembuatan Laporan Kegiatan
Tahapan Kegiatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor 2. Pengumpulan data terkait pembuatan laporan kegiatan 3. Penyusunan Laporan Kegiatan
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir) 2. Laporan Kegiatan Aktualisasi
Tanggal Pelaksanaan		7 September 2018 – 30 September 2018
Hambatan		Pada pelaksanaan kegiatan terakhir, penulis mengalami hambatan untuk dapat mencetak dan menggandakan laporan tersebut dikarenakan printer dan mesin fotokopi yang masih belum tersedia.
Solusi		Untuk mengatasi hambatan tersebut penulis mencetak dan menggandakan laporan tersebut di tempat rental fotokopi.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan		<p>Tahapan kegiatan 1 – Sebelum membuat laporan kegiatan aktualisasi, hal yang pertama penulis lakukan adalah melaksanakan konsultasi dengan mentor untuk melaporkan bahwa serangkaian kegiatan aktualisasi telah dilaksanakan dan akan dilakukan penyusunan laporan kegiatan aktualisasi yang disampaikan dengan sikap sopan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai wujud penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN yaitu Etika Publik, Whole of Government (WOG), Akuntabilitas, dan Nasionalisme.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Setelah berkonsultasi dengan mentor, penulis kemudian melakukan pengumpulan data terkait pembuatan laporan kegiatan berupa bukti-bukti/evidence tiap-tiap kegiatan dengan cermat dan teliti. Dalam tahapan kegiatan ini penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN yaitu Komitmen Mutu dan Akuntabilitas.</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Setelah semua data terkumpul, tahapan terakhir dari kegiatan aktualisasi ini adalah menyusun laporan kegiatan. Laporan kegiatan disusun secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga penulis telah mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas dan Nasionalisme.</p>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi		Dengan pembuatan laporan kegiatan, penulis telah berupaya untuk membuat sebuah bukti pertanggungjawaban telah dilaksanakannya seluruh rangkaian kegiatan pembuatan kamus teori APBN pada website Pusat Kajian Anggaran secara jujur dan transparan sehingga visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang Professional, andal, dan akuntabel dapat tercapai.
Penguatan Nilai Organisasi		Dengan pembuatan laporan kegiatan secara jujur dan transparan maka nilai organisasi Akuntabilitas, Profesionalitas, dan Integritas dapat diperkuat.
Catatan Mentor		

B. REALISASI JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI

KEGIATAN	MEI	JUNI			JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER		
	W4	W1	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	
Konsultasi dengan Atasan															
1. Menetapkan tanggal konsultasi;															
2. Menghubungi sekretaris atasan															
3. Pelaksanaan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran															
Melakukan inventarisir pustaka buku-buku/ jurnal teori APBN															
1. Konsultasi dengan mentor															
2. Mengidentifikasi buku/jurnal teori-teori berkaitan dengan APBN															
3. Melakukan pencarian buku ke Perpustakaan DPR RI, Perpustakaan MPR RI, dan website yang menyediakan jurnal online.															
4. Melakukan peminjaman buku serta mengunduh jurnal online.															
Telaahan teori-teori pendukung terkait APBN															
1. Konsultasi dengan mentor															
2. Membaca dan menelaah teori-teori berkaitan dengan APBN															
3. Membuat ringkasan teori-teori berkaitan dengan APBN															
Penyusunan kamus															
1. Mencari referensi format yang menarik melalui internet															
2. Membuat format kamus															
3. Konsultasi dengan mentor terkait format kamus															
4. Memasukkan data telaahan teori ke dalam format kamus															
5. Konsultasi dengan mentor terkait hasil telaahan teori															
6. Menginventarisir koreksi kesalahan-kesalahan dalam penulisan.															
7. Melakukan perbaikan kamus jika ada yang koreksi dari mentor/atasan															
8. Meminta persetujuan mentor untuk finalisasi kamus															
Publikasi kamus pada website Pusat Kajian Anggaran															
1. Melakukan konsultasi dengan mentor															
2. Melakukan koordinasi dengan pengelola website															
3. Mengirimkan dokumen kamus															
4. Melakukan pengecekan website.															
5. Sosialisasi kamus kepada staf dan analis APBN															
Pembuatan laporan kegiatan															
1. Konsultasi dengan mentor															
2. Pengumpulan data terkait pembuatan laporan kegiatan															
3. Penyusunan laporan kegiatan															
■ Pelaksanaan Aktualisasi															
Perubahan Jadwal															

Berdasarkan tabel di atas, terdapat dua tahap kegiatan dari kegiatan publikasi kamus pada website Pusat Kajian Anggaran yang mengalami perubahan dari jadwal yang tertera pada rancangan awal, tahapan kegiatan tersebut adalah:

3. Tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor terkait publikasi kamus

Dalam tahapan ini menurut jadwal rancangan aktualisasi seharusnya dilakukan bulan September pada minggu pertama, namun realisasinya dilakukan pada bulan Mei minggu keempat (28 Mei 2018) dikarenakan beberapa CPNS Analis APBN juga memiliki kegiatan yang sama yaitu mengajukan ijin akses oleh pengelola website (BDTI) untuk keperluan upload pada website Pusat Kajian Anggaran.

4. Tahapan kegiatan melakukan koordinasi dengan pengelola website

Dalam tahapan ini menurut jadwal rancangan aktualisasi seharusnya dilakukan bulan September pada minggu pertama, namun realisasinya dilakukan pada bulan Juni minggu pertama (7-8 Juni 2018) dikarenakan koordinasi dengan BDTI membutuhkan kesesuaian waktu antara kedua belah pihak baik dari unit Pusat Kajian Anggaran maupun dari BDTI sendiri.

BAGIAN IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, maka telah diaktualisasikan pula nilai-nilai dasar PNS serta pengetahuan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Enam kegiatan yang telah diaktualisasikan di tempat kerja selama rentang waktu 28 Mei sampai dengan 30 September 2018 yaitu:

1. Berkonsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan *Whole of Government* (WOG).
2. Melakukan inventarisir pustaka buku-buku jurnal teori APBN dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan *Whole of Government* (WOG).
3. Membuat telaahan teori-teori pendukung terkait APBN dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan *Whole of Government* (WOG).
4. Melakukan penyusunan kamus dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan *Whole of Government* (WOG).
5. Melakukan publikasi kamus pada *website* Pusat Kajian Anggaran dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan *Whole of Government* (WOG).
6. Menyusun laporan realisasi kegiatan aktualisasi dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah Komitmen Mutu, Akuntabilitas, *Whole of Government* (WOG) dan Etika Publik.

Pembelajaran yang didapat dari kegiatan aktualisasi dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS serta mengetahui peran dan kedudukan PNS dalam NKRI adalah mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas dalam melaksanakan pekerjaan, mengedepankan semangat nasionalisme di atas kepentingan pribadi maupun golongan, menerapkan standar etika publik dalam perilaku kerja dan keseharian, senantisa berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas jabatan, dan tidak melakukan praktik korupsi di lingkungan kerja.

Jika dalam melaksanakan keenam kegiatan di atas tanpa didasari nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan PNS dalam NKRI maka hasil pekerjaan akan kurang optimal sehingga menyebabkan tujuan organisasi juga tidak tercapai secara optimal.

B. SARAN

Selama proses pembelajaran klasikal maupun non klasikal dalam rangkaian pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar) CPNS DPR RI termasuk pelaksanaan program aktualisasi ini, penulis berharap bahwa kegiatan aktualisasi ini tidak hanya sebatas gagasan prasyarat dalam program diklatsar CPNS namun dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan yang dapat dikembangkan dan berkelanjutan. Teori-teori yang berkaitan dengan APBN merupakan teori yang membahas mengenai ilmu-ilmu dasar ekonomi, dimana teori-teori tersebut selalu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman sehingga Analis APBN perlu untuk memahami dan mengikuti perkembangan teori tersebut untuk mewujudkan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu memperkuat manajemen pengetahuan. Oleh karena itu, dukungan teknis dan sumber daya manusia dari Pusat Kajian Anggaran sangat diperlukan untuk dapat terus mengikuti perkembangan teori-teori yang berkaitan dengan APBN dengan harapan kegiatan ini dapat menjadi nilai tambah bagi organisasi.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Agar kegiatan aktualisasi ini bisa menjadi salah satu gagasan yang dapat dikembangkan dan berkelanjutan serta tidak hanya terhenti

sebagai gagasan prasyarat dalam program diklatsar CPNS maka penulis akan melakukan rencana tindak lanjut:

1. Berupaya untuk memperbanyak referensi bahan-bahan yang digunakan dalam melakukan penelaahan teori.
2. Berupaya untuk menambah jumlah teori-teori APBN yang belum sempat ditelaah ke dalam *website* Pusat Kajian Anggaran secara berkala.
3. Berupaya untuk memperbaiki kualitas format kamus dan telaahan menjadi lebih baik lagi.

LAMPIRAN KEGIATAN 1

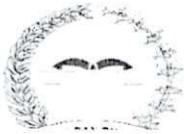
Konsultasi dengan Atasan

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama Peserta : Sekar Aditya Dwikirana
 NIP : 199405012018012002
 Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
 Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
 Isu : Kurangnya informasi menenai pustaka teori berkaitan dengan APBN
 Gagasan : Pembuatan Kamus Teori APBN Pada Website Pusat Kajian Anggaran

Kegiatan 1 : Konsultasi dengan Atasan

PENYELESAIAN KEGIATAN	CATATAN MENTOR	TANGGAL /PARAF MENTOR
Tahapan Kegiatan : 1. Menetapkan tanggal konsultasi 2. Menghubungi sekretaris atasan 3. Pelaksanaan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran	SELURUH TAHAPAN TERLAKUKAN DAN TIDAK ADA KENDALA 30/5/18 BRIL	
Output Kegiatan Terhadapan Pemecahan Isu: Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan	Done	BRIL
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 1. Akuntabilitas 2. Etika Publik 3. WOG	KETIGA SUBSTANSI MATERI TERPENUHI BRIL	
Kontribusi Terhadap Tujuan Organisasi : Dengan melakukan konsultasi bersama atasan maka fungsi organisasi yaitu koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran dapat tercapai.	PENGUATAN TELITIB ORGANISASI BRIL	
Penguatan Nilai Organisasi : Dengan konsultasi bersama atasan maka nilai organisasi yaitu nilai Akuntabilitas dan Profesionalitas dapat diperkuat	BENTUK AKUNTABIL & PROFESIONALISME BRIL	



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

ELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN

NOMOR: BK/15211/SETJEN DPR RI/PA/ /2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sekar Aditya Dwikirana, S.E.
NIP : 199405012018012002
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran DPR RI

Adalah benar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI yang melaksanakan kegiatan aktualisasi mulai tanggal 28 Mei 2018 – 30 September 2018. Adapun kegiatan aktualisasi yang dilakukan adalah melakukan pembuatan kamus teori yang berkaitan dengan APBN pada website Pusat Kajian Anggaran dengan jumlah output yaitu 10 (sepuluh) teori.

Demikian Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

**Jakarta, 30 Mei 2018
Kepala Pusat Kajian Anggaran,**

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si
NIP. 19710911 199703 1 005

LAMPIRAN KEGIATAN 2

*Melakukan Inventarisir Pustaka Buku-Buku/Jurnal
Teori APBN*

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

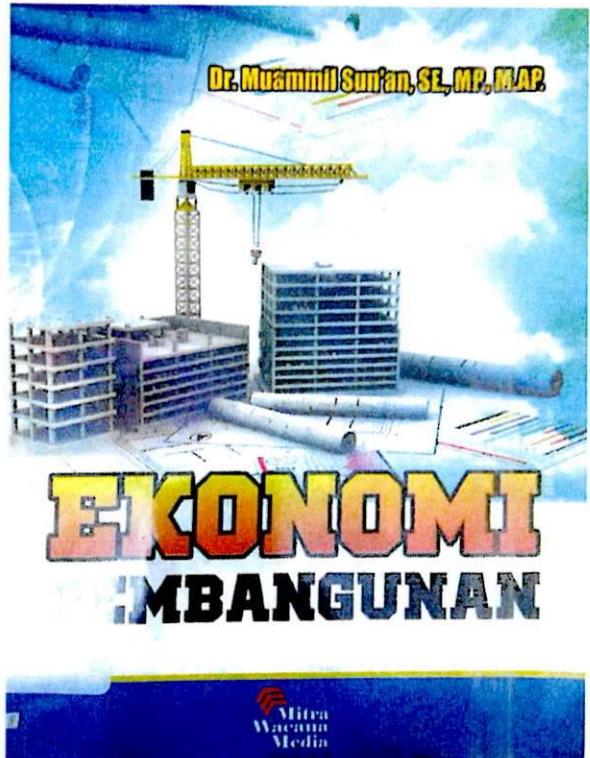
Nama Peserta : Sekar Aditya Dwikirana
 NIP : 199405012018012002
 Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
 Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
 Isu : Kurangnya informasi menenai pustaka teori berkaitan dengan APBN
 Gagasan : Pembuatan Kamus Teori APBN Pada Website Pusat Kajian Anggaran

Kegiatan 2 : Melakukan Inventarisir Pustaka Buku-Buku/Jurnal Teori APBN

PENYELESAIAN KEGIATAN	CATATAN MENTOR	TANGGAL /PARAF MENTOR
Tahapan Kegiatan : 1. Konsultasi dengan mentor. 2. Mengidentifikasi buku/jurnal teori-teori berkaitan dengan APBN 3. Melakukan pencarian buku ke Perpustakaan DPR RI, Perpustakaan MPR RI, dan website yang menyediakan jurnal online. 4. Melakukan peminjaman buku serta mengunduh jurnal online.	<i>KESEWAKUNAN TAMPAK</i> <i>(SUDAH DI LAKUKAN)</i>	4/6/18 3Rid
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: Dokumen daftar pustaka buku/jurnal yang diperlukan.	Done	3Rid
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 1. Akuntabilitas 2. Etika Publik 3. WOG	<i>KETIGA SUBSTANSI MATERI</i> <i>TERLAKUKAN SELAMA</i> <i>PROSES</i>	3Rid
Kontribusi Terhadap Tujuan Organisasi : Dengan melakukan inventarisir pustaka buku dan jurnal maka misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.	<i>MENGUATKAN REFERENSI</i> <i> PENGETAHUAN</i>	3Rid
Penguatan Nilai Organisasi : Dengan melakukan inventarisir pustaka buku dan jurnal maka nilai organisasi Profesionalitas dapat diperkuat.	<i>WUJUD PROFESIONALITAS</i>	3Rid

DRS. SUBANDI, M.M.

EKONOMI PEMBANGUNAN



DAFTAR PUSTAKA TEORI-TEORI YANG BERKAITAN DENGAN APBN

NO	TEORI	BUKU	PENGARANG	TAHUN	PENERBIT	KOTA PENERBIT
Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi						
1	Teori Adam Smith	Ekonomi Pembangunan	Drs. Subandi, M.M.	2014	Alfabeta	Bandung
		Ekonomi Pembangunan	Dr. Muammil Sun'án SE., MP., M.AP	2015	Mitra Wacana Media	Jakarta
		Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
2	Teori Ricardian	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
3	Teori Malthus	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
4	Teori Mill	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
5	Teori Klasik	Ekonomi Pembangunan	Dr. Muammil Sun'án SE., MP., M.AP	2015	Mitra Wacana Media	Jakarta
		Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
6	Teori Marxis	Ekonomi Pembangunan	Dr. Muammil Sun'án SE., MP., M.AP	2015	Mitra Wacana Media	Jakarta
		Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan			
		Ekonomi Pembangunan	Drs. Subandi, M.M.	2014	Alfabeta	Bandung
7	Teori Schumpeter	Ekonomi Pembangunan	Dr. Muammil Sun'án SE., MP., M.AP	2015	Mitra Wacana Media	Jakarta
		Ekonomi Pembangunan	Drs. Subandi, M.M.	2014	Alfabeta	Bandung
		Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
8	Teori Keynes	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
9	Teori Rostow	Ekonomi Pembangunan	Drs. Subandi, M.M.	2014	Alfabeta	Bandung
		Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
10	Teori Artur Lewis	Ekonomi Pembangunan	Drs. Subandi, M.M.	2014	Alfabeta	Bandung
		Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
11	Teori Leibenstein	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo	Jakarta
12	Teori Dorongan Kuat (Big Push Theory)	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Grafindo Persada	Jakarta
13	Teori Dualistik (Boeke)	Ekonomi Pembangunan	Drs. Subandi, M.M.	2014	Alfabeta	Bandung
		Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Grafindo Persada	Jakarta
14	Teori Myrdal	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
15	Teori Fei Ranis	Ekonomi Pembangunan	Dr. Muammil Sun'án SE., MP., M.AP	2015	Mitra Wacana Media	Jakarta
		Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta

16	Teori Chenery	Ekonomi Pembangunan	Dr. Muammil Sun'án SE., MP., M.AP	2015	Mitra Wacana Media	Jakarta
		Ekonomi Pembangunan	Drs. Subandi, M.M.	2014	Alfabeta	Bandung
		Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta

Model Model Pertumbuhan Ekonomi

17	Model Harrod Domar	Ekonomi Pembangunan	Dr. Muammil Sun'án SE., MP., M.AP	2015	Mitra Wacana Media	Jakarta
		Ekonomi Pembangunan	Drs. Subandi, M.M.	2014	Alfabeta	Bandung
		Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
18	Model Kaldor	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
19	Model Joan Robinson	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
20	Model Neo Klasik Meade	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
21	Model Jangka Panjang Solow	Ekonomi Pembangunan	Dr. Muammil Sun'án SE., MP., M.AP	2015	Mitra Wacana Media	Jakarta
		Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
22	Model Pertumbuhan Kaldor	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
23	Model Pertumbuhan Teknikal	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
24	Pertumbuhan Mantap	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
25	Model Feildman	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
26	Model Malahanobis	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	M.L. Jhingan	2004	Raja Grafindo Persada	Jakarta
27	Teori Adolf Wagner	Modul Ekonomi Publik (Teori Pengeluaran Pemerintah)	Ferry Prasetya			
28	Teori Peacock dan Wiseman					
29	Teori Batas Kritis Collin Clark					

LAMPIRAN KEGIATAN 3

Telaahan Teori-Teori Pendukung Terkait APBN

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama Peserta : Sekar Aditya Dwikirana
 NIP : 199405012018012002
 Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
 Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
 Isu : Kurangnya informasi menenai pustaka teori berkaitan dengan APBN
 Gagasan : Pembuatan Kamus Teori APBN Pada Website Pusat Kajian Anggaran

Kegiatan 3 : Telaahan Teori-Teori Pendukung terkait APBN

PENYELESAIAN KEGIATAN	CATATAN MENTOR	TANGGAL /PARAF MENTOR
Tahapan Kegiatan : 1. Konsultasi dengan mentor 2. Membaca dan menelaah teori-teori berkaitan dengan APBN 3. Membuat ringkasan teori-teori berkaitan dengan APBN	SELURUH TAHAPAN TELAH DI LAKUKAN	9/7/2018 DRW
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: Dokumen ringkasan dan telaahan teori-teori berkaitan dengan APBN	DESKRIPSIKAN LEBIH DETAIL BEBERAPA YANG PERLU ATAU TIDAK PAMILIAK	DRW
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 1. Akuntabilitas 2. Etika Publik 3. WOG	KETIGA SUBSTANSI M ^I TERPENUHI	DRW
Kontribusi Terhadap Tujuan Organisasi : Dengan melakukan telaahan teori-teori berkaitan dengan APBN maka visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang profesional serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.	MEMPERKUAT ILMU PENGETAHUAN TEORI BERKAITAN DENGAN APBN	DRW
Penguatan Nilai Organisasi : Dengan melakukan telaahan teori-teori berkaitan dengan APBN maka nilai organisasi Akuntabilitas dan Profesionalitas dapat diperkuat.	WUDUH AKUNTABEL DAN PROFESIONALISME	DRW

RINGKASAN DAN TELAAHAN TEORI-TEORI YANG BERKAITAN DENGAN APBN

TEORI ADAM SMITH

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi empat tahap yaitu:

1. Masa Perburuan

Masa perburuan adalah masa dimana belum terdapat sistem ekonomi yang kompleks. Kegiatan berburu hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompoknya dan tidak pernah ada transaksi dengan kelompok lain. Mereka masih sangat bergantung pada alam dan akan mencari tempat lain jika tempat tersebut sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Masa Bercocok Tanam dan Berternak

Masa Bercocok tanam dan berternak adalah masa dimana kebutuhan masyarakat mulai meningkat, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini yang kemudian mendorong mereka untuk menjalin hubungan dengan kelompok – kelompok di luar kelompok mereka. Oleh sebab itu, timbulah sistem jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sistem barter, yaitu sistem jual beli dengan cara menukar suatu barang dengan barang lain yang dibutuhkan.

3. Masa Perdagangan

Masa perdagangan adalah masa dimana setiap barang diperjualbelikan dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Pada masa perdagangan ini terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

4. Masa Perindustrian

Masa perindustrian adalah masa dimana kegiatan ekonomi yang dilakukan meliputi mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.

Masyarakat Tradisional → Masyarakat Modern Kapitalis

Ada dua proses yang mempengaruhi tahapan-tahapan tersebut yaitu:

- Proses Pembagian Kerja (Spesialisasi)

Pembagian kerja merupakan awal permulaan pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Pembagian kerja tersebut tidak lepas dari faktor-faktor pendorong seperti meningkatnya keterampilan pekerja dan penemuan mesin yang hemat tenaga. Pembagian kerja ini akan terjadi jika tahap pembangunan telah menuju sistem perekonomian modern kapitalis sebab pada sistem perekonomian modern kapitalis, kompleksitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup mengharuskan masyarakat tidak lagi melakukan pekerjaan secara sendiri namun lebih ditekankan untuk menggeluti bidang tertentu.

- Proses Pemupukan Modal

Pemupukan modal merupakan proses yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi bahkan Adam Smith menekankan bahwa pemupukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Pemupukan modal menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. Pemupukan modal dan investasi sangat bergantung pada perilaku menabung masyarakat, sementara di sisi lain kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengeksplorasi sumber daya yang ada. Artinya menurut teori ini, orang yang mampu menabung adalah kelompok pengusaha dan tuan tanah.

Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara simultan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain apabila timbul peningkatan kinerja pada suatu sector. Peningkatan kinerja sector akan meningkatkan daya tarik pada pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan pembagian kerja/spesialisasi, dan memperluas pasar.

Namun, semua tahap pembangunan diatas tidak lepas dari asumsi bahwa kondisi pasar yang dihadapi adalah pasar persaingan sempurna. Sedangkan, pasar persaingan sempurna pada dasarnya tidak pernah ada di dunia sehingga asumsi tidak realistik ini merupakan kelemahan teori Adam Smith.

TEORI RICARDIAN

Teori-teori Ricardian didasarkan pada asumsi sebagai berikut:

1. seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri
2. berlakunya "law of diminishing return" bagi tanah
3. persediaan tanah adalah tetap
4. permintaan gandum bersifat inelastis
5. buruh dan modal merupakan input yang bersifat variable
6. keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu
7. seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
8. harga penawaran buruh adalah tertentu
9. permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal
10. terdapat persaingan sempurna
11. pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan

dalam teori ini David Ricardo membagi masyarakat dalam tiga golongan:

- a. masyarakat pengusaha atau kapitalis – golongan ini yang memperoleh pendapatan berupa keuntungan dari hasil investasi.
- b. masyarakat pekerja atau buruh – golongan yang memperoleh pendapatan berupa upah. Besarnya upah masih sangat bergantung pada modal.
- c. tuan tanah atau bangsawan – golongan ini memperoleh berupa uang sewa atas tanah yang disewakan kepada golongan pengusaha/kapitalis

David Ricardo mengemukakan beberapa teori antara lain:

- a. Teori sewa tanah

Teori ini menjelaskan bahwa tingkat kesuburan tanah mempengaruhi tingkat uang sewa. Semakin subur tanah tersebut maka semakin tinggi uang sewa yang akan dibayar sebab tanah yang subur dapat menekan biaya-biaya yang diperlukan dalam suatu produksi sehingga dapat meningkatkan keuntungan produksi.

- b. Teori nilai kerja dan upah

Teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga suatu produk sebab biaya-biaya bahan mentah memiliki sifat yang relatif konstan sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Semakin meningkatnya standar umum biaya hidup maka akan meningkatkan tingkat upah alami yang mengakibatkan pada meningkatnya harga suatu produk.

- c. Teori komparatif

Teori ini menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien, selanjutnya kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya

Namun dari asumsi-asumsi diatas masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya mengabaikan pengaruh teknologi, pengertian yang salah tentang keadaan stasioner, pengertian yang salah tentang penduduk, kebijaksanaan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan, mengabaikan faktor-faktor kelembagaan, teori ricardo adalah teori distribusi, Tanah juga menghasilkan selain gandum, Modal dan buruh bukanlah koefisien yang tetap, dan Mengabaikan tingkat suku bunga.

TEORI MALTUS

Menurut Malthus, proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar-tidaknya aktivitas ekonomi. Dalam teorinya ini, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan.

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif.

Malthus memiliki beberapa saran untuk meningkatkan pembangunan ekonomi antara lain:

A. Meningkatkan Faktor ekonomi

1. Pertumbuhan berimbang

perekonomian dibagi menjadi dua yaitu sektor pertanian & industry. Kemajuan teknologi pada kedua sector yang membawa pada pembangunan ekonomi.

2. Meningkatkan permintaan efektif

Langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan efektif:

- a. pendistribusian kepemilikan tanah secara adil,
- b. memperluas perdagangan internal & eksternal
- c. peningkatan konsumsi tidak produktif, dan
- d. peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum.

B. Meningkatkan faktor non ekonomi seperti pendidikan, standar moral, kebiasaan bekerja keras, administrasi yang baik, dan hukum yang efisien.

Namun dari asumsi-asumsi diatas masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya stagnasi sekuler tidak melakat pada akumulasi modal, pandangan negatif terhadap akumulasi modal, komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi, tetapi dengan tenaga kerja, konsumen tidak produktif memperlambat kemajuan dan dasar tabungan bersisi satu.

TEORI KARL MARX

Karl Marx membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga yaitu:

1. Feodalisme

dalam perkembangan pada masa feodalisme tercermin kondisi yang masih bersifat tradisional dimana tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar menawar relative tinggi dibanding pelaku ekonomi yang lain.

2. Kapitalisme

Masih sama dengan feodalisme, pada masa kapitalisme para pengusaha merupakan pihak yang memiliki posisi tawar menawar yang relatif tinggi dibandingkan dengan pihak lain khususnya para buruh, bahkan dalam masa kapitalisme ini, buruh sama sekali tidak memiliki posisi tawar menawar

terhadap para pengusaha kapitalis. Hal ini yang menyebabkan terjadinya eksloitasi besar-besaran terhadap buruh dan para pengusaha lebih fokus pada peningkatan pendapatan mereka dengan melakukan pemupukan modal.

3. Sosialisme

Sejalan dengan perkembangan teknologi, pemupukan modal yang dilakukan pengusaha dialihkan pada investasi teknologi sehingga terjadi peralihan tenaga manusia dengan tenaga mesin yang pada akhirnya mengurangi eksloitasi buruh namun meningkatkan angka pengangguran. Fase ini merupakan titik awal tata masyarakat sosialis yang mana terjadi perubahan yaitu pemupukan modal pada masa kapitalis diganti dengan pemerataan kesempatan pemilikan sumber daya sehingga semua pihak memiliki posisi yang sama dalam hal tawar menawar.

Teori pembangunan yang dikemukakan Karl Marx selalu mendasarkan argumennya pada asumsi bahwa masyarakat terbagi pada dua golongan, yaitu masyarakat pemilik modal dengan masyarakat bukan pemilik modal dan masyarakat pemilik tanah dengan masyarakat pemilik bukan pemilik tanah. Dimana dalam kedua golongan ini terjadi konflik kepentingan.

Menurut Marx, kemampuan para pengusaha terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dan produktivitas buruh yang dipekerjakan. Nilai lebih merupakan selisih antara nilai produktivitas buruh dan upah buruh yang kemudian menjadi keuntungan bagi para pengusaha. Namun, istilah nilai lebih ini mendapat kritikan sebab dalam dunia nyata tidak ada istilah nilai lebih melainkan harga yang terwujud dan nyata. Selain itu kritikan lain yaitu mengenai keharusan perubahan dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat sosialis dengan jalan revolusi yang mengakibatkan kelanggengan kehidupan ekonomi kapitalis.

TEORI SCHUMPETER

Schumpeter berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan landasan pembangunan dan sistem ekonomi yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter juga meramalkan bahwa sistem ini juga akan mengalami staknasi seperti yang disampaikan pada teori ekonomi klasik sebelumnya.

Menurut Schumpeter, kunci utama perkembangan ekonomi adalah para inovator dan wiraswasta. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa terwujud dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Entrepreneur selain mampu meningkatkan keuntungan dan menaikkan standar hidup masyarakat juga mampu memenangkan persaingan untuk memperoleh kedudukan monopoli.

Schumpeter juga membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan "teknologi" produksi itu sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta.

Inovasi merupakan perbaikan teknologi dalam arti luas misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru yang bersumber dari kreativitas para wiraswasta untuk perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri. Ada tiga pengaruh yang ditimbulkan dari inovasi yaitu:

1. Diperkenalkannya ekonomi baru;
2. Menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi modal
3. Timbulnya proses peniruan (imitasi) dari pengusaha-pengusaha lain

TEORI ROSTOW

Rostow membagi proses pembangunan dalam lima tahap sebagai berikut:

1. Tahap Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian.
- b. Struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis dimana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang
- c. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah.

2. Tahap Prasyarat Lepas Landas

Pada tahap ini dibedakan menjadi dua ciri yaitu:

- a. Tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, Timur Tengah dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada;
- b. Tahapan yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru (*born free*) yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada.

3. Tahap Lepas Landas

Ciri-ciri dari tahap lepas landas yaitu:

- a. Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto
- b. Terjadi perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi
- c. Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan;
- d. Segala gejolak-gejolak untuk membuat perluasan di sektor modern;
- e. Potensi eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus menerus terjadi.

4. Tahap Menuju Kematangan

Pada tahap ini keadaan perekonomian yang terus menerus bertumbuh meskipun kadang-kadang disertai dengan laju yang fluktuatif, terjadi perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan-kegiatan perekonomian, timbul industri-industri baru dengan cepat dan tertinggalnya industri-industri lama. Sehingga barang-barang yang dulunya impor sekarang mampu diproduksi di dalam negeri sendiri

5. Tahap Konsumsi Tinggi

Pada tahap konsumsi tinggi ini pendapatan ril perkapita meningkat sampai pada suatu titik dimana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan.

Rostow juga menyebutkan ada tiga macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan politik antara lain:

- a. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut terhadap negara lain

- b. Menciptakan suatu *welfare state* yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif.
- c. Meningkatkan konsumsi masyarakat dari konsumsi kebutuhan primer menjadi konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier.

TEORI ARTHUR LEWIS

Teori ini pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi di perkotaan dan pedesaan, proses urbanisasi, pola investasi dan sistem penetapan upah di sektor modern.

Artur Lewis mengasumsikan bahwa dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua struktur perekonomian sebagai berikut:

- Perekonomian tradisional
Perekonomian tradisional umumnya terdapat pada daerah pedesaan dimana tingkat produktivitasnya masih rendah dengan sumber tenaga kerja yang tidak terbatas (surplus). Surplus tersebut berkaitan dengan basis perekonomian yang tradisional dimana tingkat hidup masyarakat pada kondisi subsistem, akibat perekonomian yang subsistem pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal dari tenaga kerja yang bernilai nol, artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya *law of diminishing return*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan *input* variabel (dalam hal ini tenaga kerja) justru akan menurunkan total produksi yang ada.
- Perekonomian modern
Perekonomian modern umumnya terdapat di daerah perkotaan, dimana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dari *input* yang digunakan, termasuk tenaga kerja dan juga sebagai sumber akumulasi modal. Hal ini menyiratkan bahwa nilai produk marginal terutama dari tenaga kerja bernilai positif sehingga fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal. Dengan demikian industri perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan dan para pekerja dari pedesaan dapat memperoleh pekerjaan tersebut dengan jalan urbanisasi.

Pengkajian permasalahan diatas didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Perekonomian tertutup, tidak ada perdagangan internasional dan tidak ada modal asing
- b. Tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi yang bisa disesuaikan
- c. Terdapat perubahan teknologi di sektor pertanian dan sektor industri
- d. Hanya pemilik modal yang mampu menabung dan investasi
- e. Terdapat pengangguran tidak kentara di sektor pertanian dimana sektor tenaga kerja menerima upah subsistem dan tabungan nol.

MODEL PERTUMBUHAN HARROD DOMAR

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu :

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerajan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian yang terdiri dari dua sektor yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*capital-output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio = ICOR*)

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengantikan barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal-output tersebut. Jika kita menetapkan $COR = k$, rasio kecenderungan menabung (MPS) = s yang merupakan proporsi tetap dari output total, dan investasi ditentukan oleh tingkat tabungan, maka kita bisa menyusun model pertumbuhan ekonomi yang sederhana sebagai berikut :

1. Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau (s), dari pendapatan nasional (Y). Oleh karena itu, kita pun dapat menuliskan hubungan tersebut dalam bentuk persamaan yang sederhana :

$$S = sY \quad (2.1)$$

2. Investasi neto (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K) yang dapat diwakili oleh ΔK , sehingga kita dapat menuliskan persamaan sederhana yang kedua sebagai berikut :

$$I = \Delta K \quad (2.2)$$

Akan tetapi, karena jumlah stok modal, K , mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output, Y , seperti telah ditunjukkan oleh rasio modal-output, k , maka :

$$\frac{k}{y} = k$$

atau

$$\frac{\Delta k}{\Delta y} = k$$

atau akhirnya

$$\Delta k = k \Delta y \quad (2.3)$$

3. Terakhir, mengingat tabungan nasional neto (S) harus sama dengan investasi neto (I), maka

persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut :

$$S = I \quad (2.4)$$

Dari persamaan (2.1) telah diketahui bahwa $S = sY$ dan dari persamaan (2.2) dan (2.3), telah mengetahui bahwasannya :

$$I = \Delta k = k\Delta Y$$

Dengan demikian, kita dapat menuliskan “identitas” tabungan sama dengan investasi dalam persamaan (2.4) sebagai berikut:

$$S = sY = k\Delta Y = \Delta K = I \text{ atau } s.Y = k.\Delta Y$$

Akhirnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k}$$

$\Delta Y/Y$ pada persamaan 2.4 menunjukkan tingkat pertumbuhan output (persentase perubahan output)

Persamaan (2.4) merupakan persamaan Harrod-Domar yang disederhanakan yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output ($\Delta Y/Y$) ditentukan bersama oleh rasio tabungan (s) dan rasio modal-output (COR= k). Secara spesifik, persamaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output secara positif berhubungan dengan rasio tabungan. Makin tinggi tabungan dan diinvestasikan, maka makin tinggi outputnya. Sedangkan hubungan antara COR dengan tingkat pertumbuhan output adalah negatif (makin besar COR, makin rendah tingkat pertumbuhan output).

Contoh perhitungan dari tingkat pertumbuhan ekonomi menurut Harrod Domar adalah:

Rasio modal-output (COR atau k) dari suatu negara adalah 3 dan rasio tabungan adalah 6% dari output total. Dengan menggunakan persamaan (2.4) kita akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi per tahun negara tersebut adalah 2%.

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} = \frac{6}{3} = 2$$

Jika tingkat tabungan sebesar 15% maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut naik dari 2% menjadi 5% per tahun.

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} = \frac{15}{3} = 5$$

Namun beberapa kelemahan dari model ini adalah MPS dan ICOR yang konstan padahal kenyataannya kedua hal tersebut dapat berubah dalam jangka panjang, mengabaikan perubahan harga-harga padahal perubahan harga selalu terjadi di setiap waktu, dan suku bunga yang diasumsikan tidak berubah.

TEORI KEYNES

Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat (atau output yang dihasilkan) dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi “kekurangan produksi”. Pada periode berikutnya output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama.

Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi —kelebihan produksil terjadi. Pada periode berikutnya output akan turun atau harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama.

Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat (dengan demikian, mempengaruhi situasi makro), agar mendekati posisi *Full Employment*-nya.

Permintaan Agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun. Dalam perekonomian tertutup permintaan agregat terdiri dari 3 unsur:

- 1) Pengeluaran Konsumsi oleh Rumah Tangga (C)
- 2) Pengeluaran Investasi oleh Perusahaan (I)
- 3) Pengeluaran Pemerintah (G), Pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi.

Apabila dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$Z = C+I+G$$

Masing-masing unsur permintaan agregat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Pengeluaran konsumsi tergantung pada pendapatan yang diterima oleh Rumah Tangga dan kecenderungan berkonsumsinya (propincity to consume). Pengeluaran investasi ditentukan oleh keuntungan yang diharapkan (marginal efficiency of capital) dan biaya dana (tingkat bunga). Pengeluaran pemerintah ditentukan oleh proses politik yang kompleks dan dalam teori makro dianggap eksogen.

Perubahan dari unsur-unsur permintaan agregat (pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi dan pengeluaran pemerintah) mempengaruhi tingkat permintaan agregat melalui proses berantai atau proses multiplier. Bila unsur ini meningkat dengan Rp. 1 maka tingkat permintaan agregat akan meningkat dengan suatu kelipatan dari Rp. 1 pelipat atau multiplier ini tergantung pada besarnya marginal propensity to consume (MPC).

TEORI SOLOW SWAN

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Teori ini didasarkan pada asumsi klasik yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat penggeraan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu.

Menurut teori ini, rasio modal-output (*capital-output ratio* =COR) memiliki sifat dinamis, artinya untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan adanya fleksibilitas tersebut suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat *output* tertentu.

TEORI ADOLF WAGNER

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

TEORI PEACOCK DAN WISEMAN

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan

membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang.

TEORI BATAS KRITIS COLIN CLARK

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregat. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat. Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

LAMPIRAN KEGIATAN 4

Penyusunan Kamus

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama Peserta	:	Sekar Aditya Dwikirana
NIP	:	199405012018012002
Unit Kerja	:	Pusat Kajian Anggaran
Jabatan	:	Calon Analis APBN Ahli Pertama
Isu	:	Kurangnya informasi menenai pustaka teori berkaitan dengan APBN
Gagasan	:	Pembuatan Kamus Teori APBN Pada Website Pusat Kajian Anggaran

Kegiatan 4 : Penyusunan Kamus

PENYELESAIAN KEGIATAN	CATATAN MENTOR	TANGGAL /PARAF MENTOR
Tahapan Kegiatan : 1. Mencari referensi format yang menarik melalui internet 2. Membuat format kamus 3. Konsultasi dengan mentor terkait format kamus 4. Memasukkan data telaahan teori ke dalam format kamus 5. Konsultasi dengan mentor terkait hasil telaahan teori 6. Menginventarisir koreksi kesalahan-kesalahan dalam penulisan. 7. Melakukan perbaikan kamus jika ada yang koreksi dari mentor/atasan 8. Meminta persetujuan mentor untuk finalisasi kamus	SELURUH PROSES TAMATAN SUDAH DIDALAMCAR DAN HASIL FINAL SUDAH OK	7/8/18 JRLW
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: Kamus teori-teori berkaitan dengan APBN.	SUDAH TERREALISASI SEBANYAK 10 TEORI	JRLW
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 1. Akuntabilitas 2. Etika Publik 3. Komitmen Mutu 4. WOG	KEEPMAT SUBSTANSI MP SUDAH TERPENUHI	JRLW
Kontribusi Terhadap Tusi Organisasi : Dengan melakukan penyusunan kamus maka tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN; fungsi organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran, koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi; visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang profesional dan akuntabel; serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat	MEMPERKUAT LAYANAN ORGANISASI DAN PELAKU SANTRAN TUSI	JRLW

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama Peserta : Sekar Aditya Dwikirana
NIP : 199405012018012002
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Isu : Kurangnya informasi menenai pustaka teori berkaitan dengan APBN
Gagasan : Pembuatan Kamus Teori APBN Pada Website Pusat Kajian Anggaran

tercapai.		
Penguatan Nilai Organisasi : Dengan penyusunan kamus maka nilai organisasi Akuntabilitas, Profesionalitas, dan Integritas dapat diperkuat.	WUJUD AKUNTABEL, PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS	27/IV/2024

TEORI ADAM SMITH

Dalam teori ini, Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi empat tahap yaitu:

1. Masa Perburuan

Masa perburuan adalah masa dimana belum terdapat sistem ekonomi yang kompleks. Kegiatan berburu hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompoknya dan tidak pernah ada transaksi dengan kelompok lain. Mereka masih sangat bergantung pada alam dan akan mencari tempat lain jika tempat tersebut sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Masa Bercocok Tanam dan Berternak

Masa Bercocok tanam dan berternak adalah masa dimana kebutuhan masyarakat mulai meningkat, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal ini yang kemudian mendorong mereka untuk menjalin hubungan dengan kelompok – kelompok di luar kelompok mereka. Oleh sebab itu, timbulah sistem jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sistem barter, yaitu sistem jual beli dengan cara menukar suatu barang dengan barang lain yang dibutuhkan.

3. Masa Perdagangan

Masa perdagangan adalah masa dimana setiap barang diperjualbelikan dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Pada masa perdagangan ini terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

4. Masa Perindustrihan

Masa perindustrihan adalah masa dimana kegiatan ekonomi yang dilakukan meliputi mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.

Masyarakat Tradisional —————> Masyarakat Modern Kapitalis

Selain itu, ada dua proses yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain:

• Proses Pembagian Kerja (Spesialisasi)

Pembagian kerja merupakan awal permulaan pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Pembagian kerja tersebut tidak lepas dari faktor-faktor pendorong seperti meningkatnya keterampilan pekerja dan penemuan mesin yang hemat tenaga. Pembagian kerja ini akan terjadi jika tahap pembangunan telah menuju sistem perekonomian modern kapitalis sebab pada sistem perekonomian modern kapitalis, kompleksitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup mengharuskan masyarakat tidak lagi melakukan pekerjaan secara sendiri namun lebih ditekankan untuk menggeluti bidang tertentu.

• Proses Pemupukan Modal

Pemupukan modal merupakan proses yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi bahkan Adam Smith



**JOHN ADAM
SMITH**

(5 Juni 1723-17 Juli 1790)

adalah ahli ekonomi
klasik dan salah
satu pelopor sistem
ekonomi
kapitalisme.

Karyanya yang
sangat terkenal
yaitu buku *An
Inquiry into the
Nature and Causes
of the Wealth of
Nations* yang
diterbitkan tahun

1766
menggambarkan
sejarah
perkembangan
industri dan
perdagangan di
Eropa serta dasar-
dasar
perkembangan
perdagangan bebas
dan kapitalisme.

KELEMAHAN TEORI ADAM SMITH

Asumsi bahwa setiap tahap pembangunan berada pada kondisi pasar persaingan sempurna. Sedangkan, pasar persaingan sempurna pada dasarnya tidak pernah ada di dunia sehingga asumsi tidak realistik ini menjadi kelemahan pada teori Adam Smith.

menekankan bahwa pemupukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Pemupukan modal menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. Pemupukan modal dan investasi sangat bergantung pada perilaku menabung masyarakat, sementara di sisi lain kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengeksplorasi sumber daya yang ada. Artinya menurut teori ini, orang yang mampu menabung adalah kelompok pengusaha dan tuan tanah.

apabila timbul peningkatan kinerja pada suatu sektor. Peningkatan kinerja sektor akan meningkatkan daya tarik pada pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan pembagian kerja/spesialisasi, dan memperluas pasar.

TEORI RICARDIAN

Teori-teori Ricardian didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri
2. berlakunya "law of diminishing return" bagi tanah
3. persediaan tanah adalah tetap
4. permintaan gandum bersifat inelastis
5. buruh dan modal merupakan input yang bersifat variabel
6. keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu
7. seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
8. harga penawaran buruh adalah tertentu
9. permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal
10. terdapat persaingan sempurna
11. pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan

Dalam teori ini David Ricardo membagi masyarakat dalam tiga golongan:

- a. masyarakat pengusaha atau kapitalis – golongan ini yang memperoleh pendapatan berupa keuntungan dari hasil investasi
- b. masyarakat pekerja atau buruh – golongan yang memperoleh pendapatan berupa upah. Besarnya upah masih sangat bergantung pada modal.
- c. tuan tanah atau bangsawan – golongan ini memperoleh berupa uang sewa atas tanah yang disewakan kepada golongan pengusaha/kapitalis

David Ricardo mengemukakan beberapa teori antara lain:

a. Teori sewa tanah

Teori ini menjelaskan bahwa tingkat kesuburan tanah mempengaruhi tingkat uang sewa. Semakin subur tanah tersebut maka semakin tinggi uang sewa yang akan dibayar sebab tanah yang subur dapat menekan biaya-biaya yang diperlukan dalam suatu produksi sehingga dapat meningkatkan keuntungan produksi.

b. Teori nilai kerja dan upah

Teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga suatu produk sebab biaya-biaya bahan mentah memiliki sifat yang relatif konstan sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Semakin meningkatnya standar umum biaya hidup maka akan meningkatkan tingkat upah alami yang mengakibatkan pada meningkatnya harga suatu produk.



**DAVID
RICARDO**

(18 April 1772-11 September 1823)

adalah salah
seorang pemikir
ekonomi klasik yang
paling berpengaruh
bersama dengan
Thomas Malthus,
Adam Smith, dan
John Stuart Mill.
Teori Ricardo yang
paling berpengaruh
dalam ekonomi
klasik yaitu
mengenai
keunggulan
komparatif dan
teori nilai.

Sedangkan, karya
Ricardo yang paling
terkenal adalah
*Principles of
Political Economy
and Taxation* pada
tahun 1917.

c. Teori komparatif

Teori ini menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien, selanjutnya kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya

KELEMAHAN TEORI DAVID RICARDO

1. mengabaikan pengaruh teknologi,
2. pengertian yang salah tentang keadaan stasioner
3. pengertian yang salah tentang penduduk
4. kebijaksanaan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan
5. mengabaikan faktor-faktor kelembagaan, teori ricardo adalah teori distribusi
6. tanah juga menghasilkan selain gandum, modal dan buruh bukanlah koefisien yang tetap, dan
7. mengabaikan tingkat suku bunga dahulu daripada pembagian kerja.

Pemupukan modal menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. Pemupukan modal dan investasi sangat bergantung pada perilaku menabung masyarakat, sementara di sisi lain kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengeksplorasi sumber daya yang ada. Artinya menurut teori ini, orang yang mampu menabung adalah kelompok pengusaha dan tuan tanah.

Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara simultan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain apabila timbul peningkatan kinerja pada suatu sector. Peningkatan kinerja sector akan meningkatkan daya tarik pada pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan pembagian kerja/spesialisasi, dan memperluas pasar.

TEORI MALTHUS

Menurut Malthus, proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar-tidaknya aktivitas ekonomi. Dalam teorinya ini, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan.

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding.

KELEMAHAN TEORI MALTHUS

1. stagnasi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal,
2. pandangan negatif terhadap akumulasi modal,
3. komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi, tetapi dengan tenaga kerja,
4. konsumen tidak produktif memperlambat kemajuan dan dasar tabungan bersisi satu.

Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif.

Malthus memiliki beberapa saran untuk meningkatkan pembangunan ekonomi antara lain:

A. Meningkatkan faktor ekonomi

1. Pertumbuhan berimbang

perekonomian dibagi menjadi dua yaitu sektor pertanian & industry. Kemajuan teknologi pada kedua sector yang membawa pada pembangunan ekonomi.
2. Meningkatkan permintaan efektif

Langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan efektif:

 - a. pendistribusian kepemilikan tanah secara adil,
 - b. memperluas perdagangan internal & eksternal
 - c. peningkatan konsumsi tidak produktif, dan
 - d. peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum.

- B. Meningkatkan faktor non ekonomi seperti pendidikan, standar moral, kebiasaan bekerja keras, administrasi yang baik, dan hukum yang efisien.



THOMAS ROBERT MALTHUS

(13 Februari 1766-29 Desember 1834)

adalah seorang pakar demografi Inggris dan ekonom politik yang paling terkenal.

Gagasan mengenai pembangunan ekonomi ia kemukakan pada Buku II yang berjudul "The Progress of Wealth" dari bukunya *Principles of Political Economy* yang diterbitkan pada tahun 1820.

TEORI KARL MARX

Karl Marx membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga yaitu:

1. Feodalisme

Pada masa feodalisme tercermin kondisi yang masih bersifat tradisional dimana tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar menawar relative tinggi dibanding pelaku ekonomi yang lain.

2. Kapitalisme

Pada masa kapitalisme para pengusaha merupakan pihak yang memiliki posisi tawar menawar yang relatif tinggi dibandingkan dengan pihak lain khususnya para buruh, bahkan dalam masa kapitalisme ini, buruh sama sekali tidak memiliki posisi tawar menawar terhadap para pengusaha kapitalis. Hal ini yang menyebabkan terjadinya eksloitasi besar-besaran terhadap buruh dan para pengusaha lebih fokus pada peningkatan pendapatan mereka dengan melakukan pemupukan modal.

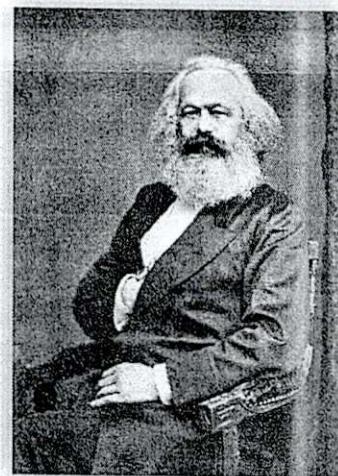
3. Sosialisme

Sejalan dengan perkembangan teknologi, pemupukan modal yang dilakukan pengusaha dialihkan pada investasi teknologi sehingga terjadi peralihan tenaga manusia dengan tenaga mesin yang pada akhirnya mengurangi eksloitasi buruh namun meningkatkan angka pengangguran. Fase ini merupakan titik awal tata masyarakat sosialis yang mana terjadi perubahan yaitu pemupukan modal pada masa kapitalis diganti dengan pemerataan kesempatan pemilikan sumber daya sehingga semua pihak memiliki posisi yang sama dalam hal tawar menawar.

KELEMAHAN TEORI KARL MARX

Istilah nilai lebih mendapat kritikan sebab dalam dunia nyata tidak ada istilah nilai lebih melainkan harga yang terwujud dan nyata. Selain itu kritikan lain yaitu mengenai keharusan perubahan dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat sosialis dengan jalan revolusi yang mengakibatkan kelanggungan kehidupan ekonomi kapitalis.

Teori pembangunan yang dikemukakan Karl Marx selalu didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat terbagi pada dua golongan, yaitu masyarakat pemilik modal dengan masyarakat bukan pemilik modal dan masyarakat pemilik tanah dengan masyarakat pemilik bukan pemilik



KARL HEINRICH MARX

(5 Mei 1818-18 Maret 1883)

adalah seorang filsuf, pakar ekonomi politik, dan teori kemasyarakatan dari Prusia. Marx menyumbang teori pembangunan ekonomi dalam tiga hal yaitu penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, dan menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. Ia sangat terkenal dengan karyanya yang berjudul adalah *Das Capital*.

tanah. Dimana dalam kedua golongan ini terjadi konflik kepentingan. Menurut Marx, kemampuan para pengusaha terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dan produktivitas buruh yang dipekerjakan. Nilai lebih merupakan selisih antara nilai produktivitas buruh dan upah buruh yang kemudian menjadi keuntungan bagi para pengusaha.

TEORI SCHUMPETER

Schumpeter berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan landasan pembangunan dan sistem ekonomi yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter juga meramalkan bahwa sistem ini juga akan mengalami staknasi seperti yang disampaikan pada teori ekonomi klasik sebelumnya.

Menurut Schumpeter, kunci utama perkembangan ekonomi adalah para inovator dan wiraswasta. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa terwujud dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Entrepreneur selain mampu meningkatkan keuntungan dan menaikkan standar hidup masyarakat juga mampu memenangkan persaingan untuk memperoleh kedudukan monopoli.

Schumpeter juga membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta.

Inovasi merupakan perbaikan teknologi dalam arti luas misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru yang bersumber dari kreativitas para wiraswasta untuk perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri. Ada tiga pengaruh yang ditimbulkan dari inovasi yaitu:

1. Diperkenalkannya ekonomi baru;
2. Menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi modal
3. Timbulnya proses peniruan (imitasi) dari pengusaha-pengusaha lain



**JOSEPH ALOIS
SCHUMPETER**

(8 Februari 1883-8 Januari 1950)

adalah seorang ekonom Amerika-Austria dan ilmuwan politik. Teori Schumpeter pertama kali dikemukakan pada bukunya dengan judul *The Theory of Economic Development* pada tahun 1934. Kemudian, Teori Schumpeter yang menggambarkan proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan ditulis dalam bukunya yang berjudul *Business Cycle* tahun 1939.

TEORI KEYNES

Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat (atau output yang dihasilkan) dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi “kekurangan produksi”. Pada periode berikutnya output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama.

Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi —kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya output akan turun atau harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama.

Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat (dengan demikian, mempengaruhi situasi makro), agar mendekati posisi *Full Employment*-nya.

Permintaan Agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun. Dalam perekonomian tertutup permintaan agregat terdiri dari 3 unsur:

- 1) Pengeluaran Konsumsi oleh Rumah Tangga (C)
- 2) Pengeluaran Investasi oleh Perusahaan (I)
- 3) Pengeluaran Pemerintah (G), Pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi.

Apabila dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$Z = C + I + G$$

Masing-masing unsur permintaan agregat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Pengeluaran konsumsi tergantung pada pendapatan yang diterima oleh Rumah Tangga dan kecenderungan berkonsumsinya (*propensity to consume*). Pengeluaran investasi ditentukan oleh keuntungan yang diharapkan (*marginal efficiency of capital*) dan biaya dana (tingkat bunga). Pengeluaran pemerintah ditentukan oleh proses politik yang kompleks dan dalam teori makro dianggap eksogen.

Perubahan dari unsur-unsur permintaan agregat (pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi dan pengeluaran pemerintah) mempengaruhi tingkat permintaan agregat melalui proses berantai atau proses multiplier. Bila unsur ini meningkat dengan Rp. 1 maka tingkat permintaan agregat akan meningkat dengan suatu kelipatan dari Rp. 1 pelipat atau multiplier ini tergantung pada besarnya marginal propensity to consume (MPC).



**JOHN
MAYNARD
KEYNES**

(5 Juni 1883-21 April 1946)

adalah seorang ekonom Inggris paling berpengaruh pada abad ke-20 dan pendiri ekonomi makro modern. Keynes dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru yakni mazhab Keynes.

Pada tahun 1936, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menantang gagasan ekonomi neoklasik melalui bukunya yang berjudul "The General Theory of Employment, Interest and Money".

TEORI ROSTOW

Rostow membagi proses pembangunan dalam lima tahap sebagai berikut:

1. Tahap Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian.
- b. Struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis dimana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang
- c. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah.

2. Tahap Prasyarat Lepas Landas

Pada tahap ini dibedakan menjadi dua ciri yaitu:

- a. Tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, Timur Tengah dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada;
- b. Tahapan yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru (*born free*) yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada.

3. Tahap Lepas Landas

Ciri-ciri dari tahap lepas landas yaitu:

- a. Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto
- b. Terjadi perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi
- c. Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan:
- d. Segala gejolak-gejolak untuk membuat perluasan di sektor modern;
- e. Potensi eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus menerus terjadi.

4. Tahap Menuju Kematangan

Pada tahap ini keadaan perekonomian yang terus menerus bertumbuh meskipun kadang-kadang disertai dengan laju yang fluktuatif, terjadi perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan-kegiatan perekonomian, timbul industri-



**WALT WHITMAN
ROSTOW**

(7 Oktober 1916-13 Februari 2003)

adalah seorang ahli ekonomi dan politikus. Teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dikembangkan oleh Rostow pada pertengahan 1950-an yang kemudian disebarluaskan melalui bukunya yang diterbitkan pada tahun 1960 dengan judul : *The Stages of Economic Growth : a non communist manifesto*

industri baru dengan cepat dan tertinggalnya industri-industri lama. Sehingga barang-barang yang dulunya impor sekarang mampu diproduksi di dalam negeri sendiri

5. Tahap Konsumsi Tinggi

Pada tahap konsumsi tinggi ini pendapatan ril perkapita meningkat sampai pada suatu titik dimana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan.

Rostow juga menyebutkan ada tiga macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan politik antara lain:

- a. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut terhadap negara lain
- b. Menciptakan suatu *welfare state* yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif.
- c. Meningkatkan konsumsi masyarakat dari konsumsi kebutuhan primer menjadi konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier.

TEORI ARTHUR LEWIS

Teori ini pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi di perkotaan dan pedesaan, proses urbanisasi, pola investasi dan sistem penetapan upah di sektor modern.

Artur Lewis mengasumsikan bahwa dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua struktur perekonomian sebagai berikut:

- Perekonomian tradisional

Perekonomian tradisional umumnya terdapat pada daerah pedesaan dimana tingkat produktivitasnya masih rendah dengan sumber tenaga kerja yang tidak terbatas (surplus). Surplus tersebut berkaitan dengan basis perekonomian yang tradisional dimana tingkat hidup masyarakat pada kondisi subsistem, akibat perekonomian yang subsistem pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal dari tenaga kerja yang bernilai nol, artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya *law of diminishing return*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan *input* variabel (dalam hal ini tenaga kerja) justru akan menurunkan total produksi yang ada.

- Perekonomian modern

Perekonomian modern umumnya terdapat di daerah perkotaan, dimana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dari *input* yang digunakan, termasuk tenaga kerja dan juga sebagai sumber akumulasi modal. Hal ini menyiratkan bahwa nilai produk marginal terutama dari tenaga kerja bernilai positif sehingga fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal. Dengan demikian industri perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan dan para pekerja dari pedesaan dapat memperoleh pekerjaan tersebut dengan jalan urbanisasi.

Pengkajian permasalahan diatas didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Perekonomian tertutup, tidak ada perdagangan internasional dan tidak ada modal asing
- b. Tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi yang bisa disesuaikan
- c. Terdapat perubahan teknologi di sektor pertanian dan sektor industri
- d. Hanya pemilik modal yang mampu menabung dan investasi
- e. Terdapat pengangguran tidak kentara di sektor pertanian dimana sektor tenaga kerja menerima upah subsistem dan tabungan nol.



**WILLIAM
ARTHUR LEWIS**

(23 Januari 1915-5 Juni 1991)

adalah seorang ekonom dari Saint Lucia. Teori Arthur Lewis ini pertama kali dimuat dalam artikel yang berjudul : "Pembangunan ekonomi dengan penawaran kerja yang tidak terbatas" dalam majalah Inggris The Manchester School pada Mei 1954.

TEORI HARROD-DOMAR

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi sebagai berikut :

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian yang terdiri dari dua sektor yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (capital-output ratio = COR) dan rasio pertambahan modal-output (incremental capital-output ratio = ICOR)

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengantikan barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal-output tersebut. Jika kita menetapkan COR = k, rasio kecenderungan menabung (MPS) = s yang merupakan



**SIR HENRY
ROY FORBES
HARROD**

(13 Februari 1900-9 Maret 1978)

adalah seorang ekonom berasal dari Inggris yang mempelopori bidang ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Harrod pertama kali merumuskan konsep tentang dinamika pertumbuhan ekonomi sekitar tahun 1930-an dan 1940-an. Ide-idenya dalam dinamika pertumbuhan ekonomi ia kemukakan dalam "Towards a Dynamic Economics" tahun 1948.

**EVSEY DAVID
DOMAR**

(16 April 1914-1 April 1997)

adalah seorang ekonom Keynesian yang berasal dari Rusia. Ia telah membuat kontribusi dalam tiga bidang utama ekonomi: sejarah ekonomi, ekonomi komparatif, dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1946 ia memunculkan gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi berfungsi untuk meringankan defisit dan utang nasional.

proporsi tetap dari output total, dan investasi ditentukan oleh tingkat tabungan, maka kita bisa menyusun model pertumbuhan ekonomi yang sederhana sebagai berikut :

1. Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau (s), dari pendapatan nasional (Y). Oleh karena itu, kita pun dapat menuliskan hubungan tersebut dalam bentuk persamaan yang sederhana :

$$S = sY \quad (2.1)$$

2. Investasi neto (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K) yang dapat diwakili oleh ΔK , sehingga kita dapat menuliskan persamaan sederhana yang kedua sebagai berikut:

$$I = \Delta K \quad (2.2)$$

Akan tetapi, karena jumlah stok modal, K , mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output, Y , seperti telah ditunjukkan oleh rasio modal-output, k , maka :

$$\frac{k}{y} = k$$

atau

$$\frac{\Delta k}{\Delta y} = k$$

atau akhirnya

$$\Delta k = k \Delta y \quad (2.3)$$

3. Terakhir, mengingat tabungan nasional neto (S) harus sama dengan investasi neto (I), maka persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut :

$$S = I \quad (2.4)$$

Dari persamaan (2.1) telah diketahui bahwa $S = sY$ dan dari persamaan (2.2) dan (2.3), telah mengetahui bahwasannya :

$$I = \Delta k = k \Delta y$$

Dengan demikian, kita dapat menuliskan “identitas” tabungan sama dengan investasi dalam persamaan (2.4) sebagai berikut:

$$S = sY = k \Delta y = \Delta K = I \text{ atau } s.Y = k.\Delta Y$$

Akhirnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k}$$

$\Delta Y/Y$ pada persamaan 2.4 menunjukkan tingkat pertumbuhan output (persentase perubahan output)

Persamaan (2.4) merupakan persamaan Harrod-Domar yang disederhanakan yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output ($\Delta Y/Y$) ditentukan bersama oleh rasio tabungan (s) dan rasio modal-output (COR= k). Secara spesifik, persamaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output secara positif berhubungan dengan rasio tabungan. Makin tinggi tabungan dan diinvestasikan, maka makin

KELEMAHAN TEORI HARROD-DOMAR

kelemahan dari model ini adalah

1. MPS dan ICOR yang konstan padahal kenyataannya kedua hal tersebut dapat berubah dalam jangka panjang,
2. mengabaikan perubahan harga-harga padahal perubahan harga selalu terjadi di setiap waktu, dan
3. suku bunga yang diasumsikan tidak berubah.

tinggi outputnya. Sedangkan hubungan antara COR dengan tingkat pertumbuhan output adalah negatif (makin besar COR, makin rendah tingkat pertumbuhan output).

Contoh perhitungan dari tingkat pertumbuhan ekonomi menurut Harrod Domar adalah:

Rasio modal-output (COR atau k) dari suatu negara adalah 3 dan rasio tabungan adalah 6% dari output total. Dengan menggunakan persamaan (2.4) kita akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi per tahun negara tersebut adalah 2%.

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} = \frac{6}{3} = 2$$

Jika tingkat tabungan sebesar 15% maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut naik dari 2% menjadi 5% per tahun.

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} = \frac{15}{3} = 5$$

TEORI PEACOCK DAN WISEMAN

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Dalam analisis tersebut, Pemerintah berusaha untuk memperbesar pengeluaran dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Padahal kenyataannya masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Namun, tingkat toleransi inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Dalam teori Peacock dan Wiseman tiga efek/gangguan yang mengakibatkan pajak tidak dapat turun kembali ke tingkat semula, antara lain:

1. **Efek penggantian (*displacement effect*)** adalah gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.
2. **Efek inspeksi (*inspection effect*)** yaitu aktivitas pemerintah yang baru terlihat setelah terjadinya gejolak perekonomian.
3. **Efek konsentrasi (*concentration effect*)** adalah gangguan sosial yang menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta.



**SIR ALAN
TURNER
PEACOCK**

(26 Juni 1922–2 Agustus 2014)

**JACK
WISEMAN**

(Desember 1919–1991)

Peacock dan Wiseman adalah ahli ekonomi yang berasal dari Inggris. Mereka mengembangkan teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan pada buku mereka berjudul *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom* yang diterbitkan pada tahun 1961.

Pengentasan ketiga efek/gangguan tersebut tidak cukup dibiayai hanya dengan pajak, oleh sebab itu pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah efek/gangguan teratas muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut.

Adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga meskipun pengentasan gangguan telah teratasi tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadinya gejolak perekonomian.

LAMPIRAN KEGIATAN 5

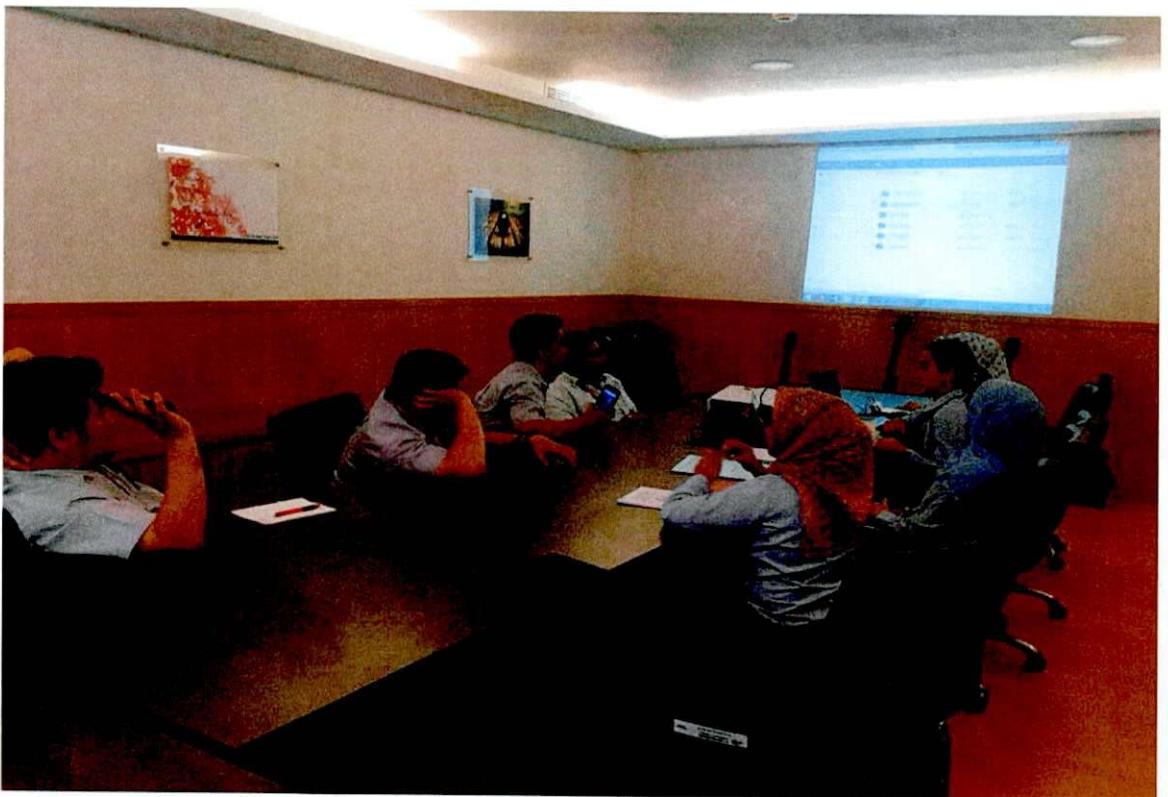
*Publikasi Kamus pada Website Pusat Kajian
Anggaran*

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

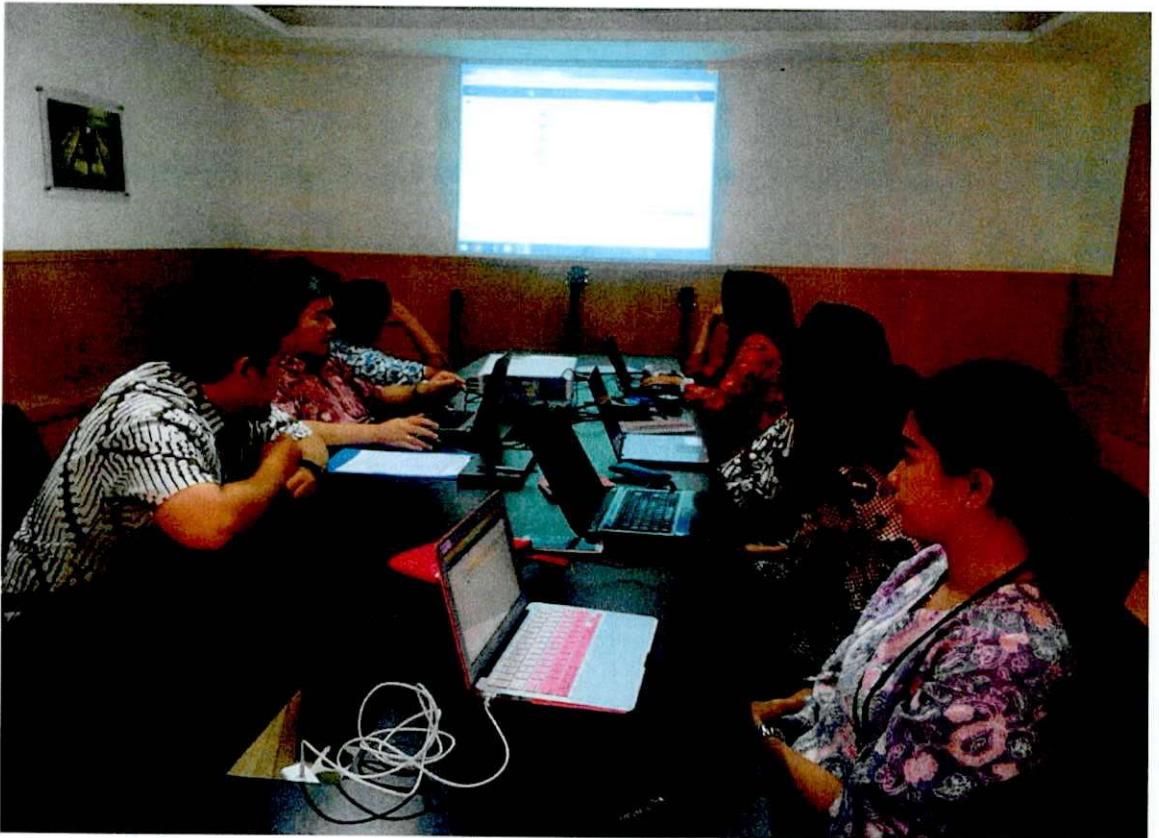
Nama Peserta : Sekar Aditya Dwikirana
 NIP : 199405012018012002
 Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
 Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
 Isu : Kurangnya informasi menenai pustaka teori berkaitan dengan APBN
 Gagasan : Pembuatan Kamus Teori APBN Pada Website Pusat Kajian Anggaran

Kegiatan 5 : Publikasi Kamus pada Website Pusat Kajian Anggaran

PENYELESAIAN KEGIATAN	CATATAN MENTOR	TANGGAL /PARAF MENTOR
Tahapan Kegiatan : 1. Melakukan konsultasi dengan mentor 2. Melakukan koordinasi dengan pengelola website 3. Mengirimkan dokumen kamus 4. Melakukan pengecekan website	SELURUH TAHAPAN SUDAH DI LAKUKAN DITAMBAH 1 TAHAPAN YAKNI: 5. SOSIALISASI KEPADA STAFF DAN ANALIS APBN	7/9/18 DRiW DRiW
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Dokumen telah terpublikasi pada website 2. Berita acara upload kamus ke website	SUDAH DI UPLOAD DI WEB PKA	DRiW
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 1. Akuntabilitas 2. Etika Publik 3. Komitmen Mutu 4. WOG	SEMUA SUBSTANSI MP SUDAH TERPENUHI	DRiW
Kontribusi Terhadap Tusi Organisasi : Dengan melakukan publikasi kamus pada website Pusat Kajian Anggaran maka tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN; fungsi organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran; visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang professional, andal, dan akuntabel; serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.	MEMPERKUAT PELAKSANAAN TUSI ORGANISASI, REFERENSI KEILMUAN DAN LAYANAN ORGANISASI	DRiW
Penguatan Nilai Organisasi : Dengan publikasi kamus maka nilai organisasi Akuntabilitas; Profesionalitas; dan Integritas dapat diperkuat.	WUJUD AKUNTABEL, PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS	DRiW



Rapat Koordinasi dengan BDTI (Kamis, 7 Juni 2018)



Rapat Koordinasi dengan BDTI (Jumat, 8 Juni 2018)

← → C Not secure puskajianggaran.dpr.go.id/kamus/id/T

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Siap Memberikan Dukungan Fungsional Anggaran Secara Profesional

BKD BERANDA TENTANG KAMI SISTEM MANAJEMEN MUTU PROFIL PRODUK

KNOWLEDGE MANAGEMENT GALERI KONTAK

Kamus

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
												#

Show 10 entries Search: teori

Kata	Arti	Aksi
Teori Adam Smith	Merupakan teori ekonomi yang menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi meliputi masa perburuan, masa bercocok tanam dan berternak, masa perdagangan, dan masa perindustrian.	DETAIL
Teori Arthur Lewis	merupakan teori ekonomi yang membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di perkotaan dan pedesaan, proses urbanisasi, pola investasi dan sistem penetapan upah di sektor modern.	DETAIL
Teori David Ricardo	merupakan teori ekonomi yang menjelaskan mengenai teori sawa tanah, teori nilai kerja dan upah, serta teori keunggulan komparatif.	DETAIL
Teori Harrod Domar	merupakan model pertumbuhan ekonomi sederhana yang ditentukan dari tingkat pertumbuhan output, rasio tabungan, dan rasio modal-output.	DETAIL

Windows taskbar: Start, File Explorer, Mail, Photos, OneDrive, Google Chrome, WhatsApp, Task View, Taskbar settings, 10:17, ENG, 27/09/2018, battery icon

Dokumen Kamus Teori APBN yang telah terpublikasi pada website puskajianggaran.dpr.go.id



Sosialisasi Kamus kepada staf dan analis APBN

Suasana sosialisasi kamus kepada staf dan analis APBN



LEMBAR TESTIMONI

Nama : Sekar Aditya Dwikirana, S.E.
Jabatan/NIP : CPNS Analis APBN Ahli Pertama/199405012018012002
Judul Kegiatan Aktualisasi : PEMBUATAN KAMUS TEORI APBN PADA WEBSITE PUSAT KAJIAN ANGGARA

Testimoni:

Dengan adanya kamus teori APBN pada website PKA cukup menarik dan membantu pengunjung website.
Mungkin yg ke depannya agar selalu update terfaik kamus teori yg berhubungan dg ekonomi,

TTD.



LEMBAR TESTIMONI

Nama : Sekar Aditya Dwikirana, S.E.
Jabatan/NIP : CPNS Analis APBN Ahli Pertama/199405012018012002
Judul Kegiatan Aktualisasi : PEMBUATAN KAMUS TEORI APBN PADA WEBSITE PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Testimoni:

Kamus teori APBN yang ada pada website PKA menjadi produk baru yang informatif dan membantu dalam penjelasan teori-teori yang berkait dengan ruang lingkup kerja Pusat Kajian Anggaran.


Dyah Natsirah

LEMBAR TESTIMONI

Nama : Sekar Aditya Dwikirana, S.E.
Jabatan/NIP : CPNS Analis APBN Ahli Pertama/199405012018012002
Judul Kegiatan Aktualisasi : PEMBUATAN KAMUS TEORI APBN PADA WEBSITE PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Testimoni:

kamus yang dibuat sangat lengkap dan memudahkan pengguna data dalam mencari teori yang dituju.
mungkin ke depannya tidak hanya teori,
tapi bisa dikembangkan lebih luas lagi
mengenai kelemahan dan kelebihan
dan teorinya.


Firdaus



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : BK/10255/SETJEN DPR RI/PA/06/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja

Jakarta, 07 Juni 2018

Kepada Yth :

1. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
2. Kepala Pusat Kajian Anggaran
3. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi beserta jajaran terkait

SETJEN DPR-RI

JAKARTA

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Pusat Kajian Anggaran akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, yang dilaksanakan pada :

Tanggal : Kamis, 07 Juni 2018
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran
Waktu : Pukul 15:00:00 s.d. 18:00:00 WIB
Acara : Pengembangan Information Technologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197109111997031005



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : BK/10226/SETJEN DPR RI/PA/06/2018

Menimbang : a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI
b. Untuk memberikan dukungan administratif, maka diperlukan surat tugas.

Dasar : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2018

Dengan ini Kepala Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan tugas kepada :

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	IV	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
2.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	197109111997031005	IV	Kepala Pusat Kajian Anggaran
3.	Dadang Prayitna, S.I.P., M.H.	196708061990031003	IV	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
4.	Mardi Harjo, S.E., M.Si.	197009151998031006	IV	Kepala Subbagian Tata Usaha
5.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	III	Kepala Subbagian Tata Usaha
6.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	IV	Pranata Komputer Madya
7.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	IV	Pranata Komputer Madya
8.	Slamet Widodo, S.E., M.E.	196702181993021001	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
9.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	III	Analis Kebijakan Pertama
10.	Rastri Paramita, S.E., M.M.	198001262014022002	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
11.	Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc.	198008132009121001	III	Pranata Komputer Muda
12.	Rendy Alvaro, S.Sos	198101032005021004	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
13.	Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.	198106012014022002	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
14.	Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.	198203042014021003	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
15.	Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.	198501032014022001	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
16.	Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M	198506072014021001	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
17.	Dahiri, S.Si., M.Sc	198703232014021004	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
18.	Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.	198706302014022004	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
19.	Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.	198806212014022001	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
20.	Faqih Nur Huda, S.E.	199111162018011003	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
21.	Vita Puji Lestari, S.E.	199306092018012002	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
22.	Sekar Aditya Dwikirana	199405012018012002	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
23.	Memed Sobari	196810091997031003	III	Pengelola Data
24.	Musbiyatun	197011101997032006	III	Pengelola Data
25.	Martin Yohannes	197103131994031004	III	Pengelola Data
26.	Siti Rahmawati, S.E.	198006112003122004	III	Pengelola Data
27.	Sylvia Febrina, S.I.A.	199101032018012001	III	Penyusun Bahan Kebijakan
28.	Hilda Piska Randini, S.I.P.	199103162018012001	III	Penyusun Bahan Kebijakan
29.	TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE	23000020	III	PPNPN
30.	RICKA WARDIANINGSIH, SE	23000021	III	PPNPN
31.	MUTIARA SHINTA ANDINI, SE	23000024	III	PPNPN
32.	FRANSINA NATALIA MAHUDIN, SE	23000025	III	PPNPN
33.	ERVITA LULUK ZAHARA, SE	23000027	III	PPNPN
34.	MUJIBURRAHMAN	23000030	III	PPNPN

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
35.	HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc	23000031	III	PPNPN
36.	FIRLY NUR AGUSTIANI, SE	23000034	III	PPNPN
37.	OLANIE VABIOLA BANGUN, SIP.,MM	23000035	III	PPNPN
38.	FEBRINA ELIA NABABAN,S.Pd.,M.Sc	23000037	III	PPNPN
39.	MATIUS WINARNO, SE.,MAB	23000039	III	PPNPN
40.	EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak	23000040	III	PPNPN
41.	IRANISA, SE.,M.Acc	23000041	III	PPNPN
42.	DYAH MAYSARAH, S.Hut	23000042	III	PPNPN
43.	NURUL AZIZAH AZ ZAKIYYAH, SE.,M.Sc	23000043	III	PPNPN
44.	LARAS LINTANG ASMORO, SE.,MM	23000044	III	PPNPN
45.	ANISA FITRIA WULANINGTYAS, SE	23000045	III	PPNPN
46.	RIZA ADITYA SYAFRI, S.Ak	23000046	III	PPNPN
47.	RAHAYUNINGSIH	23000047	III	PPNPN
48.	DEASY DWI RAMIAYU	23000048	III	PPNPN
49.	DESSY MULYANTI HARAHAP	180000087	II	PPNPN
50.	EMPENG SUNADI	190000066	II	PPNPN

Untuk mengikuti Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja PUSAT KAJIAN ANGGARAN Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari Kamis, 07 Juni 2018, Pukul 15:00:00 s.d. 18:00:00 WIB dalam rangka Pengembangan Information Technologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran.

Demikian Surat Tugas ini di buat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 07 Juni 2018

Kepala Pusat Kajian Anggaran,



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197109111997031005

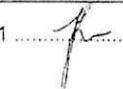
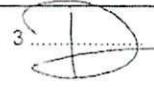
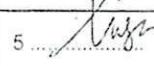
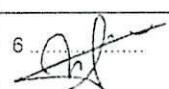
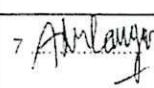
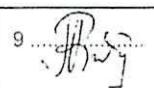
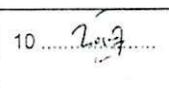
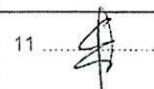
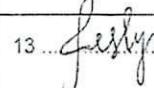
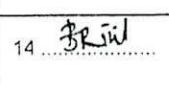
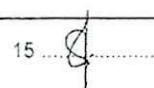
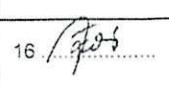
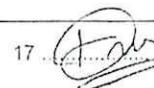
DAFTAR HADIR
RAPAT DALAM KANTOR DILUAR JAM KERJA
Pengembangan Information Technologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran

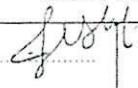
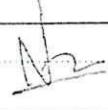
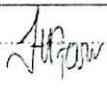
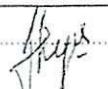
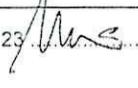
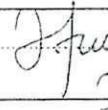
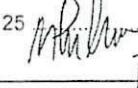
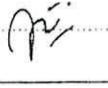
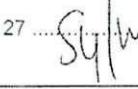
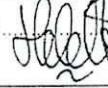
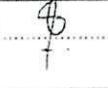
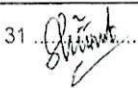
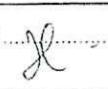
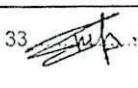
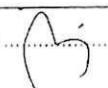
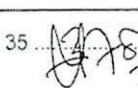
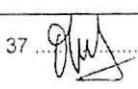
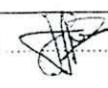
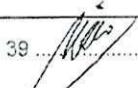
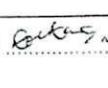
Tanggal : Kamis, 07 Juni 2018

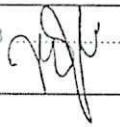
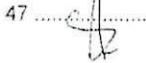
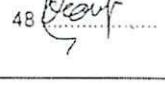
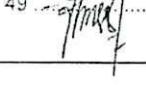
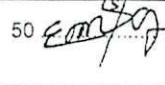
Waktu : 15:00:00 s.d. 18:00:00

Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran

Acara : Pengembangan Information Technologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1 
2.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	197109111997031005	Kepala Pusat Kajian Anggaran	2 
3.	Dadang Prayitna, S.I.P., M.H.	196708061990031003	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi	3 
4.	Mardi Harjo, S.E., M.Si.	197009151998031006	Kepala Subbagian Tata Usaha	4 
5.	Dahlia Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	5 
6.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	6 
7.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya	7 
8.	Slamet Widodo, S.E., M.E.	196702181993021001	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	8 
9.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	9 
10.	Rastri Paramita, S.E., M.M.	198001262014022002	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	10 
11.	Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda	11 
12.	Rendy Alvaro, S.Sos	198101032005021004	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	12 
13.	Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.	198106012014022002	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	13 
14.	Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.	198203042014021003	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	14 
15.	Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.	198501032014022001	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	15 
16.	Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M	198506072014021001	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	16 
17.	Dahiri, S.Si., M.Sc	198703232014021004	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	17 
18.	Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.	198706302014022004	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	18 

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
19.	Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.	198806212014022001	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	19 
20.	Faqih Nur Huda, S.E.	199111162018011003	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	20 
21.	Vita Puji Lestari, S.E.	199306092018012002	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	21 
22.	Sekar Aditya Dwikirana	199405012018012002	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	22 
23.	Memed Sobari	196810091997031003	Pengelola Data	23 
24.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	24 
25.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data	25 
26.	Siti Rahmawati, S.E.	198006112003122004	Pengelola Data	26 
27.	Sylvia Febrina, S.I.A.	199101032018012001	Penyusun Bahan Kebijakan	27 
28.	Hilda Piska Randini, S.I.P.	199103162018012001	Penyusun Bahan Kebijakan	28 
29.	TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE	23000020	PPNPN	29 
30.	RICKA WARDIANINGSIH, SE	23000021	PPNPN	30 
31.	MUTIARA SHINTA ANDINI, SE	23000024	PPNPN	31 
32.	FRANSINA NATALIA MAHUDIN, SE	23000025	PPNPN	32 
33.	ERVITA LULUK ZAHARA, SE	23000027	PPNPN	33 
34.	MUJIBURRAHMAN	23000030	PPNPN	34 
35.	HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc	23000031	PPNPN	35 
36.	FIRLY NUR AGUSTIANI, SE	23000034	PPNPN	36 
37.	OLANIE VABIOLA BANGUN, SIP.,MM	23000035	PPNPN	37 
38.	FEBRINA ELIA NABABAN,S.Pd.,M.Sc	23000037	PPNPN	38 
39.	MATIUS WINARNO, SE.,MAB	23000039	PPNPN	39 
40.	EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak	23000040	PPNPN	40 

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	IRANISA, SE.,M.Acc	23000041	PPNPN	41 ... 	
42.	DYAH MAYSARAH, S.Hut	23000042	PPNPN		42 ... 
-43.	NURUL AZIZAH AZ ZAKIYYAH, SE.,M.Sc	23000043	PPNPN	43 	
*44.	LARAS LINTANG ASMORO, SE.,MM	23000044	PPNPN		44 ... 
45.	ANISA FITRIA WULANINGTYAS, SE	23000045	PPNPN	45 	
46.	RIZA ADITYA SYAFRI, S.Ak	23000046	PPNPN		46 
47.	RAHAYUNINGSIH	23000047	PPNPN	47 	
48.	DEASY DWI RAMIAYU	23000048	PPNPN		48 
49.	DESSY MULYANTI HARAHAP	180000087	PPNPN	49 	
50.	EMPENG SUNADI	190000066	PPNPN		50 

LAPORAN HASIL RAPAT

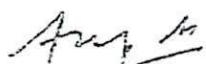
Pengundang : PUSAT KAJIAN ANGGARAN
No. Surat Undangan : BK/10255/SETJEN DPR RI/PA/06/2018
Tgl. Surat Undangan : Kamis, 07 Juni 2018
Tgl. RDK : Kamis, 07 Juni 2018
Waktu : 15:00:00 s.d. 18:00:00
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran
Acara : Pengembangan Information Technologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran
Peserta : Kepala Pusat Kajian Anggaran, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pranata Komputer Muda, Analis Kebijakan Pertama, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda, Pranata Komputer Madya, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama, Penyusun Bahan Kebijakan, Pengelola Data, PPNP

CATATAN / KESIMPULAN

Acara ini berlangsung dengan baik, dengan hasil-hasil dari diskusi yaitu sebagai berikut :

1. Dalam mendukung terwujudnya koordinasi yang baik antar pegawai analis APBN dan Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran, maka dibutuhkan pengadaan folder sharing. BDTI pun akan memberikan dukungan seperti pembukaan akses pegawai untuk cloud.dpr.go.id.
2. Dalam rangka melakukan update teori APBN dalam menu kamus pada website pusat kajian anggaran. BDTI memberikan akses sebagai admin untuk dapat mengupload file teori tersebut., dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.
3. Pembuatan videografis dilakukan dengan menambahkan suatu ruang dalam website Pusat Kajian Anggaran. Penambahan ruang untuk keperluan videografis tersebut dilakukan dengan menambahkan satu sub menu "videografis" di bawah sub menu "infografis" sebagai bagian dari menu "produk" pada website Pusat Kajian Anggaran. Agar tidak memberatkan website saat loading, maka sebagai tampilan tidak berbentuk grafik yang dinamis melainkan cover videografis yang akan bergerak jika di klik terlebih dahulu. Selain itu, untuk melakukan pengunggahan videografis, maka akan dibuka akses admin untuk melakukan unggah videografis setelah mendapat ijin prinsip dari Kepala Pusat Kajian Anggaran. Besaran videografis maksimal yang dapat diunggah adalah sebesar 128MB.
4. Semua file yang akan diupload ke Website Pusat Kajian Anggaran harus mendapatkan persetujuan oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran.

Jakarta, 07 Juni 2018
Kepala Pusat Kajian Anggaran,



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197109111997031005



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : BK/10265/SETJEN DPR RI/PA/06/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja

Jakarta, 08 Juni 2018

Kepada Yth :

1. Kepala Badan Keahlian
2. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
3. Kepala Pusat Kajian Anggaran
4. Kepala Bagian Tata Usaha Badan Keahlian beserta jajaran terkait
5. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi beserta jajaran terkait

SETJEN DPR-RI

JAKARTA

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Pusat Kajian Anggaran akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, yang dilaksanakan pada :

Tanggal : Jumat, 08 Juni 2018
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran
Waktu : Pukul 15:30:00 s.d. 18:30:00 WIB
Acara : Pengembangan Information Technologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197109111997031005



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : BK/10264/SETJEN DPR RI/PA/06/2018

Menimbang : a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI
b. Untuk memberikan dukungan administratif, maka diperlukan surat tugas.

Dasar : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2018

Dengan ini Kepala Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan tugas kepada :

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1.	Kadir Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.	195811081983031006	IV	Kepala Badan Keahlian
2.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	IV	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
3.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	197109111997031005	IV	Kepala Pusat Kajian Anggaran
4.	Dra. Rini Koentarti, M.Si.	196110091993032001	IV	Kepala Bagian Tata Usaha Badan Keahlian
5.	Dadang Prayitna, S.I.P., M.H.	196708061990031003	IV	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
6.	Afniwaty Tanjung, S.E., M.E.	196901201998032003	IV	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.	Mardi Harjo, S.E., M.Si.	197009151998031006	IV	Kepala Subbagian Tata Usaha
8.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	IV	Pranata Komputer Madya
9.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	IV	Pranata Komputer Madya
10.	Slamet Widodo, S.E., M.E.	196702181993021001	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
11.	Rastri Paramita, S.E., M.M.	198001262014022002	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
12.	Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc.	198008132009121001	III	Pranata Komputer Muda
13.	Rendy Alvaro, S.Sos	198101032005021004	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
14.	Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.	198106012014022002	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
15.	Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.	198203042014021003	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
16.	Marihot Nasution, S.E., M.Si.	198410092014022001	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
17.	Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.	198501032014022001	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
18.	Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M	198506072014021001	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
19.	Dahiri, S.Si., M.Sc	198703232014021004	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
20.	Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.	198806212014022001	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
21.	Faqih Nur Huda, S.E.	199111162018011003	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
22.	Vita Puji Lestari, S.E.	199306092018012002	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
23.	Sekar Aditya Dwikirana	199405012018012002	III	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
24.	Memed Sobari	196810091997031003	III	Pengelola Data
25.	Budi Rachmat	197010021998031003	III	Pengelola Data Pencairan Dana
26.	Musbiyatun	197011101997032006	III	Pengelola Data
27.	Martin Yohannes	197103131994031004	III	Pengelola Data
28.	Siti Rahmawati, S.E.	198006112003122004	III	Pengelola Data
29.	Sylvia Febrina, S.I.A.	199101032018012001	III	Penyusun Bahan Kebijakan
30.	Hilda Piska Randini, S.I.P.	199103162018012001	III	Penyusun Bahan Kebijakan
31.	TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE	23000020	III	PPNPN
32.	RICKA WARDIANINGSIH, SE	23000021	III	PPNPN
33.	MUTIARA SHINTA ANDINI, SE	23000024	III	PPNPN

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
34.	FRANSINA NATALIA MAHUDIN, SE	23000025	III	PPNPN
35.	ERVITA LULUK ZAHARA, SE	23000027	III	PPNPN
36.	MUJIBURRAHMAN	23000030	III	PPNPN
37.	HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc	23000031	III	PPNPN
38.	FIRLY NUR AGUSTIANI, SE	23000034	III	PPNPN
39.	OLANIE VABIOLA BANGUN, SIP.,MM	23000035	III	PPNPN
40.	FEBRINA ELIA NABABAN,S.Pd.,M.Sc	23000037	III	PPNPN
41.	MATIUS WINARNO, SE.,MAB	23000039	III	PPNPN
42.	EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak	23000040	III	PPNPN
43.	IRANISA, SE.,M.Acc	23000041	III	PPNPN
44.	NURUL AZIZAH AZ ZAKIYYAH, SE.,M.Sc	23000043	III	PPNPN
45.	LARAS LINTANG ASMORO, SE.,MM	23000044	III	PPNPN
46.	ANISA FITRIA WULANINGTYAS, SE	23000045	III	PPNPN
47.	RIZA ADITYA SYAFRI, S.AK	23000046	III	PPNPN
48.	RAHAYUNINGSIH	23000047	III	PPNPN
49.	DEASY DWI RAMIAYU	23000048	III	PPNPN
50.	DESSY MULYANTI HARAHAP	180000087	II	PPNPN

Untuk mengikuti Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja PUSAT KAJIAN ANGGARAN Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari Jumat, 08 Juni 2018, Pukul 15:30:00 s.d. 18:30:00 WIB dalam rangka Pengembangan Information Technologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran.

Demikian Surat Tugas ini di buat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 08 Juni 2018

Kepala Pusat Kajian Anggaran,



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

NIP. 197109111997031005

DAFTAR HADIR
RAPAT DALAM KANTOR DILUAR JAM KERJA
Pengembangan Information Technologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran

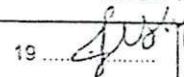
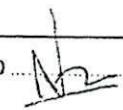
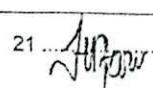
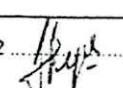
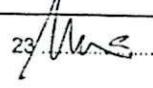
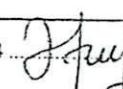
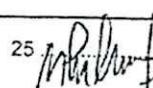
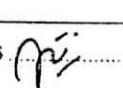
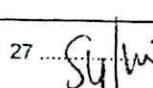
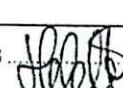
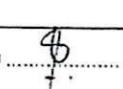
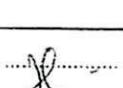
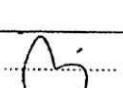
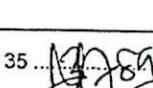
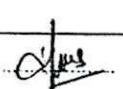
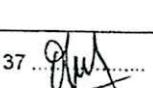
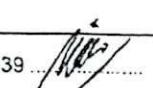
Tanggal : Jumat, 08 Juni 2018

Waktu : 15:30:00 s.d. 18:30:00

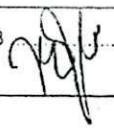
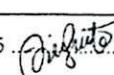
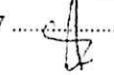
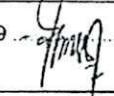
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran

Acara : Pengembangan Information Technologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Kadir Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.	195811081983031006	Kepala Badan Keahlian	1.	
2.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		2.
3.	Dr. Asep Ahmad Saefullah, S.E., M.Si.	197109111997031005	Kepala Pusat Kajian Anggaran	3.	1
4.	Dra. Rini Koentarti, M.Si.	196110091993032001	Kepala Bagian Tata Usaha Badan Keahlian		4.
5.	Dadang Prayitha, S.I.P., M.H.	196708061990031003	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi	5.	
6.	Afniwaty Tanjung, S.E., M.E.	196901201998032003	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan		6.
7.	Mardi Harjo, S.E., M.Si.	197009151998031006	Kepala Subbagian Tata Usaha	7.	
8.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya		8.
9.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya	9.	
10.	Slamet Widodo, S.E., M.E.	196702181993021001	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda		10.
11.	Rastri Paramita, S.E., M.M.	198001262014022002	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	11.	
12.	Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda		12.
13.	Rendy Alvaro, S.Sos	198101032005021004	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	13.	
14.	Jesly Yurianty Panjaitan, S.E., M.M.	198106012014022002	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama		14.
15.	Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.	198203042014021003	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	15.	
16.	Marihot Nasution, S.E., M.Si.	198410092014022001	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama		16.
17.	Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.	198501032014022001	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	17.	
18.	Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M	198506072014021001	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama		18.

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
19.	Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.	195506212014022001	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	19 
20.	Faqih Nur Huda, S.E.	199111162018011003	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	20 
21.	Vita Puji Lestari, S.E.	199306092018012002	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	21 
22.	Sekar Aditya Dwikirana	199405012018012002	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	22 
23.	Memed Sobari	195810091997031003	Pengelola Data	23 
24.	Musbiyatun	197011101997032005	Pengelola Data	24 
25.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data	25 
26.	Siti Rahmawati, S.E.	198006112003122004	Pengelola Data	26 
27.	Sylvia Febrina, S.I.A.	199101032018012001	Penyusun Bahan Kebijakan	27 
28.	Hilda Piska Randini, S.I.P.	199103162018012001	Penyusun Bahan Kebijakan	28 
29.	TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE	23000020	PPNPN	29 
30.	RICKA WARDIANINGSIH, SE	23000021	PPNPN	30 
31.	MUTIARA SHINTA ANDINI, SE	23000024	PPNPN	31 
32.	FRANSINA NATALIA MAHUDIN, SE	23000025	PPNPN	32 
33.	ERVITA LULUK ZAHARA, SE	23000027	PPNPN	33 
34.	MUJIBURRAHMAN	23000030	PPNPN	34 
35.	HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc	23000031	PPNPN	35 
36.	FIRLY NUR AGUSTIANI, SE	23000034	PPNPN	36 
37.	OLANIE VABIOLA BANGUN, SIP.,MM	23000035	PPNPN	37 
38.	FEBRINA ELIA NABABAN,S.Pd.,M.Sc	23000037	PPNPN	38 
39.	MATIUS WINARNO, SE.,MAB	23000039	PPNPN	39 

REVISI

	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IRANISA, SE.,M.Acc	23000041	PPNPN	41 
2.	DYAH MAYSARAH, S.Hut	23000042	PPNPN	
3.	NURUL AZIZAH AZ ZAKIYYAH, SE.,M.Sc	23000043	PPNPN	43 
4.	LARAS LINTANG ASMORO, SE.,MM	23000044	PPNPN	
5.	ANISA FITRIA WULANINGTYAS, SE	23000045	PPNPN	45 
6.	RIZA ADITYA SYAFRI, S.Ak	23000046	PPNPN	46 
7.	RAHAYUNINGSIH	23000047	PPNPN	47 
8.	DEASY DWI RAMIAYU	23000048	PPNPN	48 
9.	DESSY MULYANTI HARAHAP	180000087	PPNPN	49 
10.	EMPENG SUNADI	190000066	PPNPN	50 

LAPORAN HASIL RAPAT

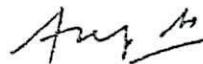
Pengundang : PUSAT KAJIAN ANGGARAN
No. Surat Undangan : BK/10265/SETJEN DPR RI/PA/06/2018
Tgl. Surat Undangan : Jumat, 08 Juni 2018
Tgl. RDK : Jumat, 08 Juni 2018
Waktu : 15:30:00 s.d. 18:30:00
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran
Acara : Pengembangan Information Technologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran
Peserta : Kepala Badan Keahlian, Kepala Pusat Kajian Anggaran, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Kepala Bagian Tata Usaha Badan Keahlian, Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Pranata Komputer Muda, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda, Pranata Komputer Madya, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama, Pengelola Data Pencairan Dana, Pengelola Data, Penyusun Bahan Kebijakan, PPNPN

CATATAN / KESIMPULAN

Acara ini berlangsung dengan baik, dengan hasil-hasil dari diskusi yaitu sebagai berikut :

1. Pelatihan dilakukan oleh BDTI terkait kelanjutan cloud.dpr.go.id sehingga folder sharing dapat terwujud di Pusat Kajian Anggaran. Akses cloud.dpr.go.id hanya bisa dimasuki oleh PNS di lingkungan Pusat Kajian Anggaran dengan username yang sama dengan portal dpr.go.id. Namun, Pegawai Tidak Tetap di DPR RI bisa juga mengakses cloud tersebut dengan memperoleh tautan/link yang diberikan pembuat folder sharing tersebut.
2. Penambahan sub menu data indikator ekonomi berupa tampilan grafik pada menu produk di website Pusat Kajian Anggaran. Data indikator kesejahteraan masyarakat akan diolah dengan Microsoft Excel dan disajikan dalam bentuk grafik. Grafik tersebut akan discreenshot dan dimasukkan dalam website dalam format JPG. Serta dibuat deskripsi mengenai data tersebut.
3. Pembuatan dan Ujicoba proses unggah videografis pada website puskaji anggaran dan konsultasi dengan bdti terkait penambahan fungsi untuk mendukung kelancaran pengunggahan videografis.
4. BDTI memberikan pelatihan terkait teknis / cara mengupload file deskripsi peristiwa pada menu knowledge management di website Pusat Kajian Anggaran.

Jakarta, 08 Juni 2018
Kepala Pusat Kajian Anggaran,



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197109111997031005



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715349 FAX. (021) 5715423 / 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

NOTA DINAS
NO. BK/10288/SETJEN DAN BK-DPR RI/PA/06/2018

Kepada : Yth. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
Dari : Kepala Pusat Kajian Anggaran
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Website Pusat Kajian Anggaran
Tanggal : 7 Juni 2018

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, permohonan untuk pembukaan akses website Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI atas nama:

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOL
1	Hilda Piska Randini, SIP	199103162018012001	Staf TU	III
2	Sylvia Febrina, S.I.A.	199101032018012001	Staf TU	III
3	Sekar Aditya Dwikirana	199405012018012002	Analis APBN	III
4	Faqih Nur Huda, S.E.	199111162018011003	Analis APBN	III
5	Vita Puji Lestari, S.E.	199306092018012002	Analis APBN	III

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapan terima kasih.

Kepala Pusat Kajian Anggaran

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197009151998031006

Arifuny V. 8/6-18.



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
NOMOR: BK/15212/SETJEN DAN BK-DPRRI/PA/08/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sekar Aditya Dwikirana, S.E.
NIP : 19940501 201801 2 002
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran DPR RI

Adalah benar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI yang melaksanakan kegiatan aktualisasi berupa pembuatan kamus teori APBN pada website Pusat Kajian Anggaran mulai tanggal 28 Mei 2018 – 30 September 2018. Adapun dalam rangkaian kegiatan aktualisasi tersebut, diantaranya terdapat kegiatan publikasi kamus pada website Pusat Kajian Anggaran.

Demikian Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 31 Agustus 2018
Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si
NIP. 19710911 199703 1 005



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
Telp. (021) 5715349 FAX. (021) 5715423 / 5715925, WEBSITE : www.dpr.go.id

BERITA ACARA
NOMOR: BK/19213/SETJEN DAN BK-DPRRI /PA/09/2018

Pada hari tanggal September 2018 , kami masing-masing:

1. Nama : Sekar Aditya Dwikirana, S.E.
NIP : 199405012018012002
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran DPR RI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

2. Nama : Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
NIP : 198203042014021003
Jabatan : Analis APBN Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Telah melaksanakan pengunggahan kamus teori APBN pada **website** Pusat Kajian Anggaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pihak Kedua,

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
NIP. 19820304 201402 1 003

Jakarta, ~~7~~ September 2018
Pihak Pertama,

Sekar Aditya Dwikirana, S.E.
NIP. 199405012018012002

Mengetahui,
Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si
NIP. 19710911 199703 1 005

LAMPIRAN KEGIATAN 6

Pembuatan Laporan Kegiatan

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama Peserta : Sekar Aditya Dwikirana
 NIP : 199405012018012002
 Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
 Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
 Isu : Kurangnya informasi menenai pustaka teori berkaitan dengan APBN
 Gagasan : Pembuatan Kamus Teori APBN Pada Website Pusat Kajian Anggaran

Kegiatan 6 : Pembuatan Laporan Kegiatan

PENYELESAIAN KEGIATAN	CATATAN MENTOR	TANGGAL /PARAF MENTOR
Tahapan Kegiatan : 1. Konsultasi dengan mentor 2. Pengumpulan data terkait pembuatan laporan kegiatan 3. Penyusunan laporan kegiatan.	SELURUH TAHAPAN SUDAH TERLAKUKAN DENGAN BAIK	28/9/18 BRW
Output Kegiatan Terhadapan Pemecahan Isu: Laporan Kegiatan Pembuatan Kamus	SUDAH	BRW
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 1. Akuntabilitas 2. Etika Publik 3. WOG	KETIKA SUBSTANSI, YPT SUDAH TERPENUHI	BKRW
Kontribusi Terhadap Tusi Organisasi : Dengan pembuatan laporan kegiatan maka visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel dapat tercapai.	BERCONTRIBUSI, BAGI PADA MEREKA MENDAPAT LCAU TUSINYA	BKRW
Penguatan Nilai Organisasi : Dengan pembuatan laporan kegiatan maka nilai organisasi Akuntabilitas; Profesionalitas; dan Integritas dapat diperkuat.	WUJUD AKUNTABEL, PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS	BRW